



RAPOR KINERJA 2 TAHUN PEMERINTAHAN



NAMA PENERIMA

Prabowo Subianto

Gibran Rakabuming Raka

CENTER OF ECONOMIC AND LAW STUDIES (CELIOS)
KABINET BAYANGAN

Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran



Penulis

Media Wahyudi Askar
Isnawati Hidayah
Bhima Yudhistira Adhinegara
Yoby Afis
Aulia Lianasari
M Satria Riza Permana
M. Bakhrul Fikri
Galau D Muhammad
Tim Kabinet Bayangan

Penata Desain

Mazdan Maftukha Assyayuti

Penerbit

Center of Economic and
Law Studies (CELIOS),
Jakarta, Indonesia

Tentang CELIOS

CELIOS adalah lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makro-ekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik. CELIOS memiliki dedikasi untuk mendorong reformasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, menciptakan ekonomi rendah karbon dan pelibatan aktif dari masyarakat terdampak pembangunan.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pemerintah, lembaga komersial, donor, maupun organisasi eksternal lainnya. Penelitian dilaksanakan secara independen oleh CELIOS sebagai bagian dari kegiatan penelitian institusi.

Independensi Penelitian

Seluruh proses penelitian, termasuk penyusunan metodologi, pengumpulan dan pengolahan data, analisis, interpretasi hasil, serta penyusunan rekomendasi dilakukan secara independen oleh tim peneliti.

Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan finansial maupun non-fiansial yang dapat mempengaruhi desain, pelaksanaan, analisis, interpretasi, maupun publikasi hasil penelitian ini.

Etika Penelitian dan Perlindungan Responden

Partisipasi dalam penelitian ini bersifat sukarela. Sebelum berpartisipasi, responden memperoleh informasi mengenai tujuan penelitian dan memberikan persetujuan untuk berpartisipasi (*informed consent*).

Informasi responden dikelola dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan dan perlindungan data pribadi. Identitas individual responden tidak ditampilkan dalam laporan, dan hasil penelitian disajikan dalam bentuk yang tidak memungkinkan identifikasi individu, kecuali apabila terdapat persetujuan eksplisit dari pihak yang bersangkutan.

Ucapan Terima Kasih

Tim peneliti menyampaikan terima kasih kepada enumerator, para ahli dalam expert judgment, reviewer eksternal untuk penyusunan survei atas kontribusi dan dukungan yang diberikan selama proses penelitian. Keterlibatan pihak-pihak tersebut tidak serta-merta menunjukkan persetujuan terhadap seluruh temuan, interpretasi, maupun rekomendasi dalam laporan ini.

Hak Cipta

© 2026 CELIOS
CELIOS memegang hak cipta publikasi ini, termasuk teks, analisis, logo, dan desain tata letak. Permintaan untuk memperbanyak sebagian atau seluruh isi publikasi dikirimkan ke admin@celios.co.id.

Kutipan

Seluruh isi dari publikasi yang diterbitkan oleh CELIOS bebas untuk dikutip sepanjang mencantumkan sumber.

RAPOR 2 TAHUN KABINET PRABOWO - GIBRAN
BERDASARKAN PENILAIAN MASYARAKAT

Nama	Nilai	Nilai Akhir 4,7
<i>Prabowo Subianto</i>	<i>4,6</i>	
<i>Gibran Rakabuming Raka</i>	<i>4,9</i>	

No.	Komponen Penilaian	Nilai	
		Angka	Keterangan
1	Masuknya Militer ke Ranah Sipil	51%	Responden menilai Pemerintah melakukan penguatan peran militer ke ranah sipil.
2	Penguatan Peran Pemerintah Pusat Merugikan Daerah	60%	Responden menilai sentralisasi yang terjadi merugikan Pemerintah Daerah.
3	Kondisi Mental dan Fisik Presiden Diragukan	61%	23% responden menilai kondisi mental dan fisik Presiden tidak baik sama sekali dan 38% menilai kurang baik.
4	Kondisi Ekonomi Memburuk Dibanding Tahun Lalu	53%	53% responden menyatakan kondisi ekonominya memburuk, 21% menyatakan tidak ada perubahan.
5	Pemerintah Tak Mampu Atasi Masalah Pengangguran dan Lapangan Kerja	62%	24% responden menilai kebijakan Pemerintah sangat buruk, 38% menilai buruk.
6	Pajak dan Pungutan Membebani Masyarakat	82%	Responden menilai Pajak dan Pungutan sangat membebani masyarakat.
7	Setuju MBG Dihentikan	76%	Responden menilai MBG harus dihentikan.
8	Pemerintah Tidak Mampu Tangani Karhutla	96%	74% responden menilai Pemerintah sangat tidak efektif dan 22% menilai tidak efektif dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.
9	Kunjungan Luar Negeri Tidak Ada Manfaat Nyata	66%	Responden menilai kunjungan luar negeri Presiden tidak membawa manfaat bagi masyarakat.
10	Utang Pemerintah Membebani Generasi Mendatang	66%	Responden menilai utang Pemerintah hari ini akan membebani generasi masa depan.
11	Tidak Memilih Prabowo Lagi	55%	Responden yang memilih Prabowo di 2024, menyatakan kecewa dan tidak akan memilih lagi di Pemilu selanjutnya.
12	Stres dengan Kebijakan Pemerintah	75%	Responden yang merasakan stres akibat dari kebijakan yang dibuat Pemerintah.
13	Stres dengan Perilaku Prabowo	67%	Responden dibuat stres oleh perilaku Prabowo Subianto.

RAPOR 2 TAHUN KABINET PRABOWO - GIBRAN BERDASARKAN PENILAIAN AHLI

Nama	Nilai	Nilai Akhir
<i>Prabowo Subianto</i>	<i>2,8</i>	
<i>Gibran Rakabuming Raka</i>	<i>2,2</i>	2,9

No.	Komponen Penilaian	Nilai	
		Angka	Keterangan
1	Masuknya Militer ke Ranah Sipil	80%	Ahli menilai adanya peningkatan peran militer ke ranah sipil.
2	Kewenangan Makin Tersentralisasi	84%	Ahli menilai Pemerintahan saat ini semakin tersentralisasi.
3	Penguatan Peran Pemerintah Pusat Merugikan Daerah	89%	Ahli menilai pemusatan kewenangan Pemerintah Pusat merugikan ekonomi daerah.
4	Khawatir terhadap Arah Kebijakan Pemerintah	92%	Ahli sangat khawatir dengan arah kebijakan pemerintah saat ini.
5	Kapasitas Kepemimpinan Presiden Tidak Memadai	93%	Ahli meragukan kemampuan Presiden dalam mengambil keputusan strategis.
6	Khawatir Gaya Kepemimpinan dan Komunikasi Presiden	93%	Ahli menilai gaya kepemimpinan dan komunikasi publik Presiden mengkhawatirkan.
7	Setuju MBG Dihentikan	87%	Ahli menilai program MBG harus dihentikan.
8	Kopdes Merah Putih Tidak Dirancang Memadai	91%	Ahli meragukan Kopdes Merah Putih akan menciptakan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
9	Pemerintah Tidak Mampu Tangani Karhutla	96%	Ahli menyatakan pemerintah tidak efektif dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.
10	Kunjungan Luar Negeri Tidak Ada Manfaat Nyata	66%	Ahli menilai diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden belum membawa manfaat yang terverifikasi.
11	Utang Pemerintah Membebani Generasi Mendatang	59%	Ahli melihat adanya utang Pemerintah yang akan membebani generasi masa depan.

10 Pejabat dengan Kinerja Terburuk dan Harus Di-reshuffle

- **Bahlil Lahadalia**
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
-159
Poin
- **Natalius Pigai**
Menteri Hak Asasi Manusia
-158
Poin
- **Raja Juli Antoni**
Menteri Kehutanan
-103
Poin
- **Sudaryono**
Kepala Badan Gizi Nasional
-47
Poin
- **Zulkifli Hasan**
Menteri Koordinator Bidang Pangan
-43
Poin
- **Nusron Wahid**
Menteri Agraria dan Tata Ruang
-24
Poin
- **Pratikno**
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
-17
Poin
- **Saifullah Yusuf**
Menteri Sosial
-17
Poin
- **Muhaimin Iskandar**
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
-16
Poin
- **Fadli Zon**
Menteri Kebudayaan
-16
Poin

Daftar Isi

- 1** | Mengapa Pemerintahan Perlu Dievaluasi secara Independen?
 - 2** | Mengukur Kinerja, Menguji Akuntabilitas
- 3** | Metodologi Pengumpulan Data dan Analisis
 - 4** | Uji Validitas dan Reliabilitas
 - 5** | Metode Analisis Pemeringkatan Kinerja Kabinet
- 6** | Rapor
 - 7** | Rapor Presiden
 - 8** | Rapor Wakil Presiden
 - 9** | Rapor Menteri
 - 10** | Rapor Kabinet Merah Putih
- 11** | Rapor Kinerja Sektoral Oleh Kabinet Bayangan
 - 30** | Pusat Pemerintahan: Masalah Konstitusional dan Manajerial
 - 31** | Sektor-Sektor: Kendali Menguat, Layanan Melemah
 - 33** | Benang Merah dan Evaluasi Utama
- 34** | Penilaian Capaian Program Kerja Kabinet Merah Putih Berbasis Sektor
 - 34** | Implementasi Program Prioritas
 - 37** | Penilaian Terhadap Kebijakan Pemerintah
 - 38** | Tata Kelola Pemerintahan
 - 43** | Kepemimpinan dan Komunikasi Publik
 - 47** | Kinerja Pemerintahan dan Dampaknya Bagi Masyarakat
- 49** | Pesan Untuk Prabowo Subianto
- 54** | Mencari Pemimpin Masa Depan



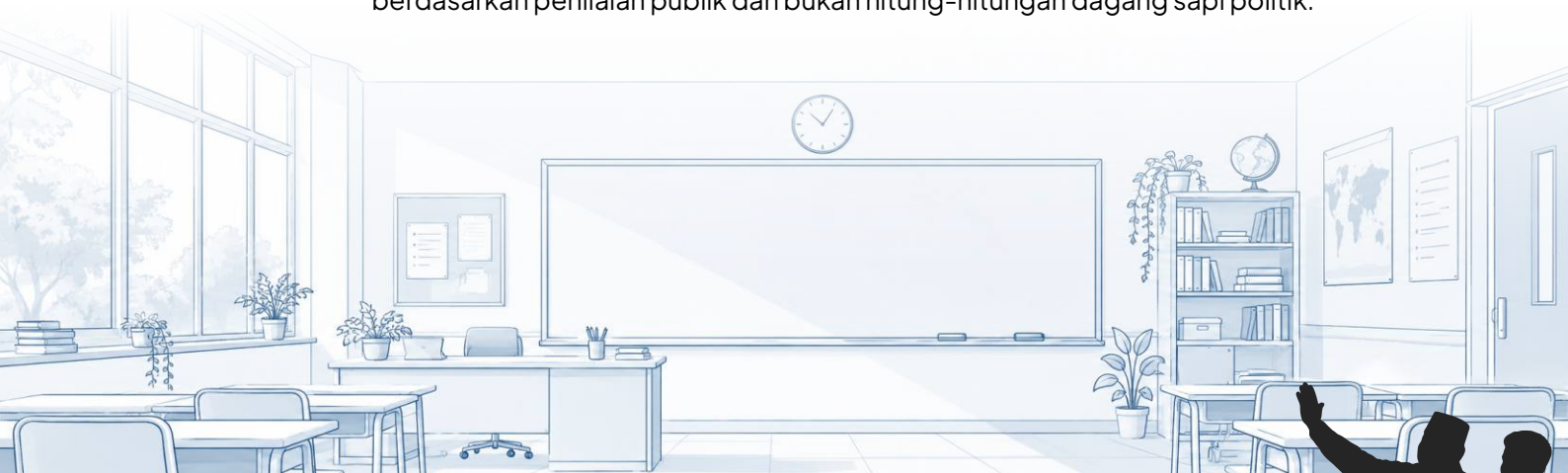
1

Mengapa Pemerintahan Perlu Dievaluasi secara Independen?

Dua tahun adalah waktu yang cukup bagi suatu pemerintahan untuk menunjukkan kinerjanya. Bulan madu telah usai, dan janji yang dulu diteriakkan Prabowo-Gibran dari panggung kampanye, kini harus berhadapan dengan harga bahan pokok, lapangan kerja, dan dompet rakyat. Studi ini sejatinya adalah refleksi dari tagihan masyarakat, mana yang sudah berjalan, mana yang hanya janji belaka, siapa yang paling diuntungkan, dan apa dampaknya ke masyarakat.

Pertanyaan ini sejatinya muncul di ruang parlemen. Namun ketika hampir seluruh kekuatan politik melebur ke dalam koalisi pemerintah, fungsi pengawasan legislatif kehilangan giginya, dan keluhan warga berhenti di depan pintu DPR tanpa pernah menjadi sikap politik. Studi ini lahir dari kekosongan itu, dengan harapan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, sekaligus sebagai sebuah saluran untuk mengamplifikasi suara publik yang tidak lagi menemukan wakilnya di lembaga yang seharusnya mewakilinya.

Studi ini menjelaskan persepsi publik terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran serta capaian kinerja pemerintah. Dua tahun terakhir juga ditandai oleh pergantian menteri yang terlalu sering. Harapannya, studi ini bisa menjadi cermin untuk menunjukkan siapa yang layak dipertahankan dan siapa yang sepatutnya diganti karena tidak berhasil menjalankan tugasnya dalam menciptakan kebijakan publik yang menyejahterakan masyarakat, berdasarkan penilaian publik dan bukan hitung-hitungan dagang sapi politik.



1.1. Mengukur Kinerja, Menguji Akuntabilitas

Rapor penilaian kinerja ini bertujuan untuk menilai kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran yang sudah berjalan selama dua tahun secara independen dan berbasis bukti, dengan melihat tidak hanya apa yang telah dilakukan pemerintah, tetapi juga apa yang dihasilkan dan dirasakan masyarakat. Secara khusus, studi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut:

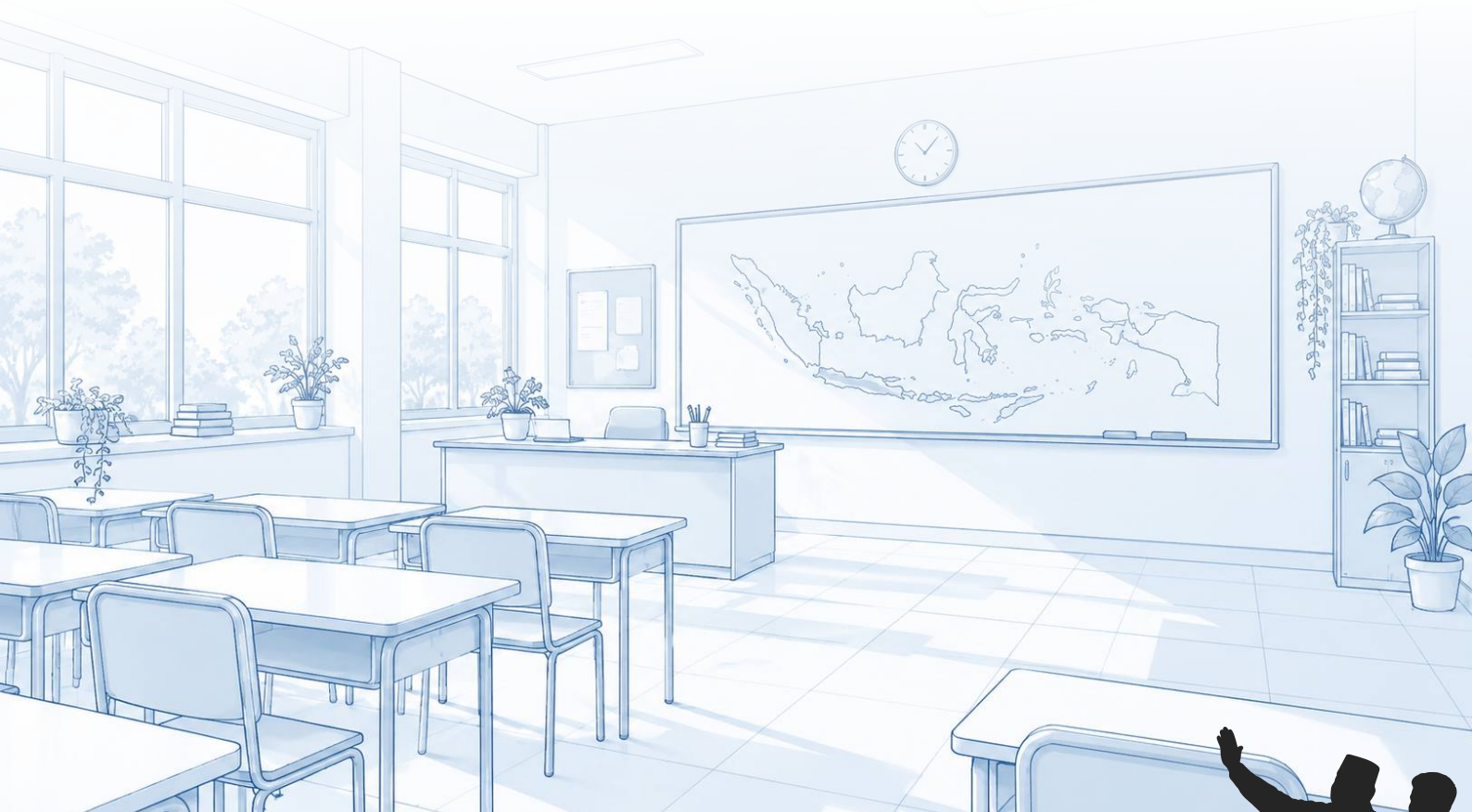
- 1 Se jauh mana pemerintahan Prabowo–Gibran memenuhi janji dan target kebijakannya selama dua tahun pertama?
- 2 Apakah implementasi program pemerintah telah menghasilkan *outcome* dan perubahan yang nyata bagi masyarakat, bukan sekadar pencapaian *output* administratif?
- 3 Bagaimana kinerja pemerintah pada masing-masing sektor, dan faktor apa yang menjelaskan perbedaan kinerja antar-sektor?
- 4 Se jauh mana terdapat kesenjangan antara klaim atau capaian pemerintah dengan penilaian ahli dan pengalaman masyarakat?
- 5 Bagaimana dinamika dan pergantian kepemimpinan kementerian berkaitan dengan kontinuitas kebijakan dan akuntabilitas kinerja?



2

Metodologi Pengumpulan Data dan Analisis

Studi ini menggunakan pendekatan survei yang dirancang secara terpisah untuk masyarakat umum, dan kelompok ahli, dengan metode pengambilan sampel yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok. Pengumpulan data mulai dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 9 Oktober 2026. Survei masyarakat umum menggunakan pendekatan *non-probability sampling* melalui Meta Ads, yang kemudian dilengkapi dengan pembobotan (*weighting*) untuk menyesuaikan komposisi sampel dengan karakteristik populasi yang menjadi acuan. Sedangkan survei ahli menggunakan *snowball sampling* untuk menjangkau responden dengan keahlian dan pengalaman yang relevan. Penyusunan instrumen dilakukan melalui proses yang ketat, termasuk uji validitas dan reliabilitas, serta penelaahan oleh pihak eksternal untuk memastikan pertanyaan disusun secara objektif, memiliki kualitas pengukuran yang memadai, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.



2.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

2.1.1. Para Ahli (*Expert Judgement*)

Survei ini juga mengumpulkan data untuk *expert judgement*, menggunakan pendekatan *snowball sampling* dalam proses pengumpulan data, yaitu responden awal yang memenuhi kriteria keahlian diminta untuk merekomendasikan ahli lain yang relevan dengan topik penelitian. Survei ini melibatkan 129 responden ahli dengan latar belakang keahlian, wilayah domisili, dan pengalaman profesional yang beragam. Peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap pertanyaan berskala dalam survei ahli untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan mampu mengukur aspek yang diteliti secara tepat dan konsisten. Validitas item diuji menggunakan korelasi Pearson antara skor item dan skor total, sedangkan validitas konstruk dievaluasi melalui analisis faktor eksploratori dengan mempertimbangkan nilai *Kaiser-Meyer-Olkin* (KMO), uji *Bartlett*, dan *factor loading*.

Reliabilitas instrumen diukur menggunakan *Cronbach's alpha* terstandar dengan ambang $\geq 0,70$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Skala Penilaian Kinerja Pemerintah atas 11 item yang valid dan memiliki reliabilitas sangat baik ($\alpha=0,895$; $KMO=0,797$; $Bartlett\ p<0,001$), sementara pertanyaan yang berhubungan dengan kekhawatiran responden (yang terdiri atas dua item: kekhawatiran terhadap arah kebijakan dan gaya kepemimpinan) juga menunjukkan reliabilitas yang baik ($r\ antar-item=0,768$; koefisien *Spearman-Brown*= $0,869$). Hasil analisis faktor gabungan mengidentifikasi tiga dimensi utama dalam instrumen, yaitu penilaian terhadap pemimpin, efektivitas kebijakan, dan tingkat kekhawatiran. Temuan ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan memiliki struktur pengukuran yang cukup jelas serta tingkat validitas konstruk dan konsistensi internal yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.2. Masyarakat Umum

Pengumpulan data masyarakat umum melibatkan 1.142 responden yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap pertanyaan berskala dalam survei masyarakat umum untuk memastikan bahwa instrumen mampu mengukur penilaian publik terhadap pemerintahan secara tepat dan konsisten. Pengujian validitas konstruk menunjukkan bahwa data sangat layak untuk analisis faktor ($KMO=0,956$; $Bartlett\ p<0,001$), dengan satu faktor utama yang menjelaskan 56,2% variasi jawaban, sehingga secara umum item-item tersebut merepresentasikan satu dimensi utama penilaian publik terhadap pemerintahan. Dari sisi reliabilitas, instrumen menunjukkan konsistensi internal yang sangat tinggi, dengan *Cronbach's alpha* terstandarisasi sebesar 0,950 dan *McDonald's ω* sebesar 0,952; hasil ini juga tetap stabil dalam berbagai uji sensitivitas. Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa 17 item dalam skala akhir

memiliki validitas konstruk dan konsistensi internal yang dapat dipertanggungjawabkan untuk digunakan dalam analisis penilaian publik terhadap pemerintahan.

2.2. Metode Analisis Pemeringkatan Kinerja Kabinet

Studi ini menyusun peringkat kinerja menteri berdasarkan persepsi responden dengan menggunakan *positional scoring rule*, yaitu setiap posisi dalam urutan pilihan (pertanyaan survei) diberikan bobot tertentu. Skema pembobotan mengadaptasi sistem yang digunakan dalam *Ballon d'Or*. Pendekatan ini merupakan pengembangan dari *Borda Count*, yang mengagregasikan preferensi responden dengan mempertimbangkan posisi masing-masing kandidat dalam urutan pilihan (Young, 1975)¹.

Secara teoritis, Young (1974)² menunjukkan bahwa *Borda's Rule* memiliki sejumlah karakteristik penting, yaitu *neutrality*, *consistency*, *faithfulness*, dan *cancellation*. Skema pembobotan yang digunakan dalam studi ini tetap mempertahankan tiga karakteristik pertama, tetapi tidak memenuhi prinsip *cancellation* karena memberikan bobot yang lebih besar pada kandidat yang menempati posisi teratas. Pilihan ini dilakukan secara sengaja agar hasil pemeringkatan lebih sensitif terhadap menteri yang secara konsisten ditempatkan responden pada peringkat tertinggi, bukan sekadar sering muncul dalam daftar pilihan.



- 1 Young (1975), "Social Choice Scoring Functions", *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 28(4)
- 2 Young, H. P. (1974). An axiomatization of Borda's rule. *Journal of Economic Theory*, 9(1), 43–52



3

Rapor

Prabowo Gibran
mendapatkan rapor
merah.

Penilaian
masyarakat
dan para ahli
menunjukkan
adanya jurang
antara janji politik,
arah kebijakan, dan
kinerja pemerintah
yang dirasakan.



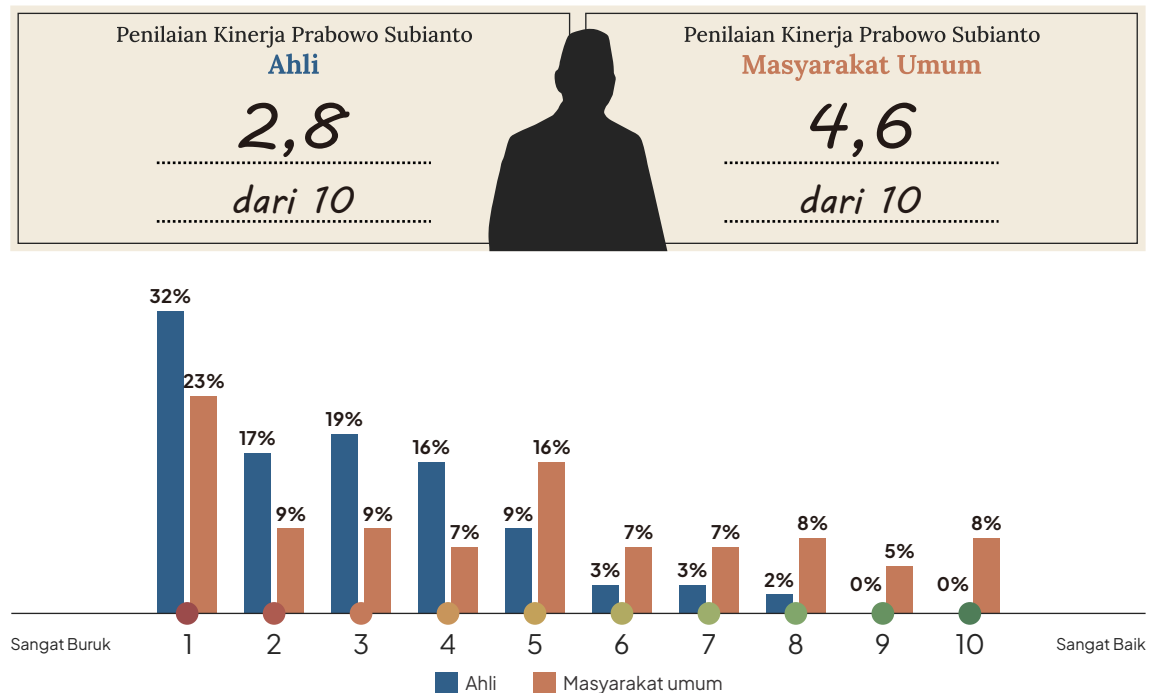
3.1. Rapor Presiden

Presiden Prabowo Subianto mendapat nilai rata-rata 4,6 dari 10 berdasarkan penilaian masyarakat (Gambar 1). Nilai 1 menjadi pilihan terbanyak (23%). Secara keseluruhan, 48% responden memberi nilai rendah (1–4), 23% menilai cukup (5–6), dan 28% menilai baik hingga sangat baik (7–10).

Sementara itu, ahli menilai kinerja Prabowo Subianto jauh lebih buruk, dengan nilai rata-rata sebesar 2,8.

Gambar 1

Penilaian Kinerja 2 Tahun Presiden Prabowo Subianto



Sumber:

Survei Masyarakat Umum (1.142), dan Ahli (N = 129), diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan "Bagaimana Anda menilai kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan selama dua tahun terakhir?"

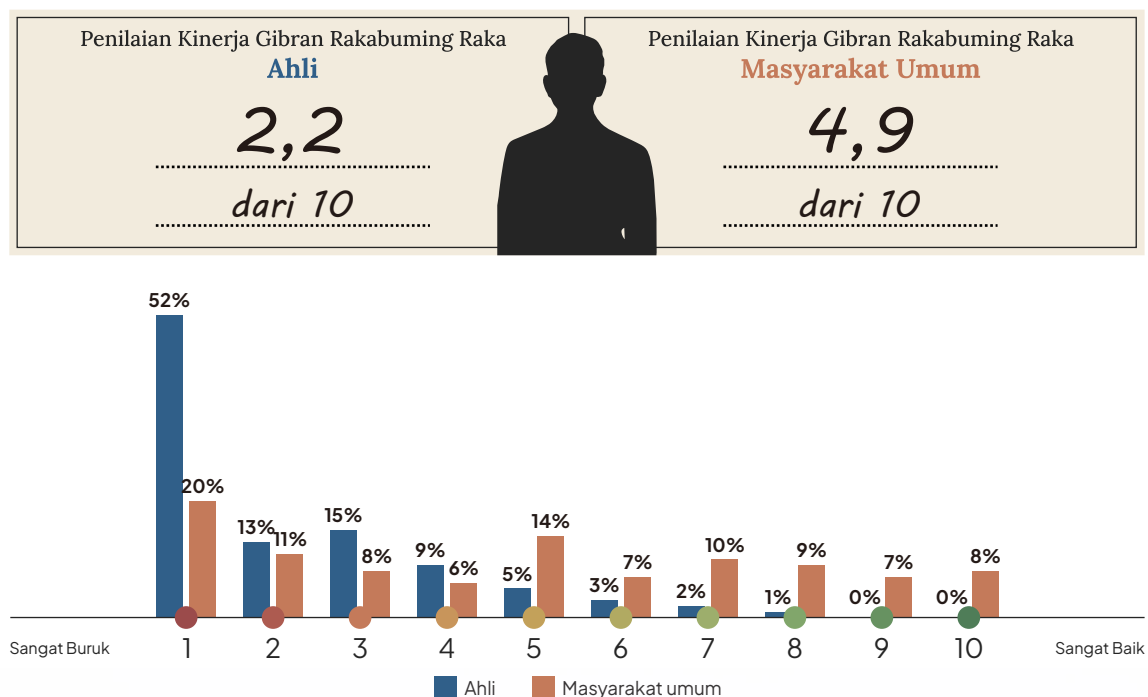
3.2. Rapor Wakil Presiden

Berdasarkan penilaian masyarakat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat nilai rata-rata 4,9 dari 10 (Gambar 2). Sebanyak 45% responden memberi nilai rendah (1–4), 21% menilai cukup (5–6), dan 34% menilai baik hingga sangat baik (7–10). Persentase penilaian baik hingga sangat baik lebih besar dibanding Presiden (34% berbanding 28%).

Sementara itu, ahli menilai kinerja Gibran Rakabuming Raka jauh lebih buruk, dengan nilai rata-rata sebesar 2,2.

Gambar 2

Penilaian Kinerja 2 Tahun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka



Sumber:

Survei Masyarakat Umum (1.142), dan Ahli (N = 129), diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan "Bagaimana Anda menilai kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya selama dua tahun terakhir?"

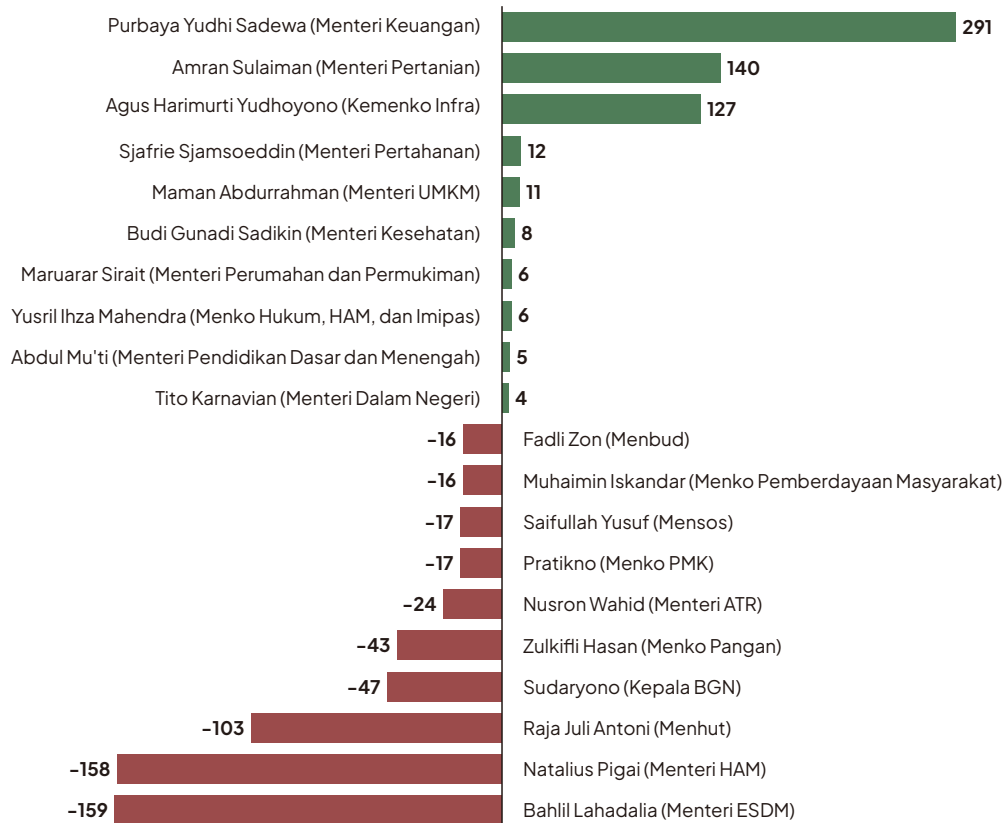
3.3. Rapor Menteri

Purbaya Yudhi Sadewa (Menteri Keuangan) menempati posisi teratas sebagai menteri dengan kinerja terbaik dengan skor 291, lebih dari dua kali lipat skor Amran Sulaiman (Menteri Pertanian) yang menempati posisi kedua sebesar 140 (Gambar 3). Agus Harimurti Yudhoyono (Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan) berada di posisi ketiga dengan skor 127. Setelah tiga nama tersebut, skor menteri lainnya anjlok drastis ke angka 2 digit, menunjukkan bahwa hanya segelintir menteri yang kinerjanya benar-benar dikenali dan diapresiasi publik.

Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) menempati posisi terendah dengan skor -159, disusul Natalius Pigai (Menteri HAM) dengan -158 dan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dengan -103 (Gambar 3). Skor ketiga nama tersebut jauh tertinggal dibandingkan pejabat lain dalam daftar ini yang berada pada kisaran -16 hingga -47. Skor negatif ini menunjukkan bahwa ketiganya jauh lebih sering dinilai buruk, sehingga layak menjadi prioritas evaluasi dan reshuffle.

Gambar 3

Menteri Dengan Kinerja Terbaik Hingga Terburuk



Sumber:

Survei Masyarakat Umum CELIOS (2026), diolah oleh peneliti. Skor merupakan selisih antara penilaian terbaik dan terburuk (N=994).

Catatan: Survei dilakukan setelah reshuffle Menteri Keuangan dan sebelum reshuffle Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

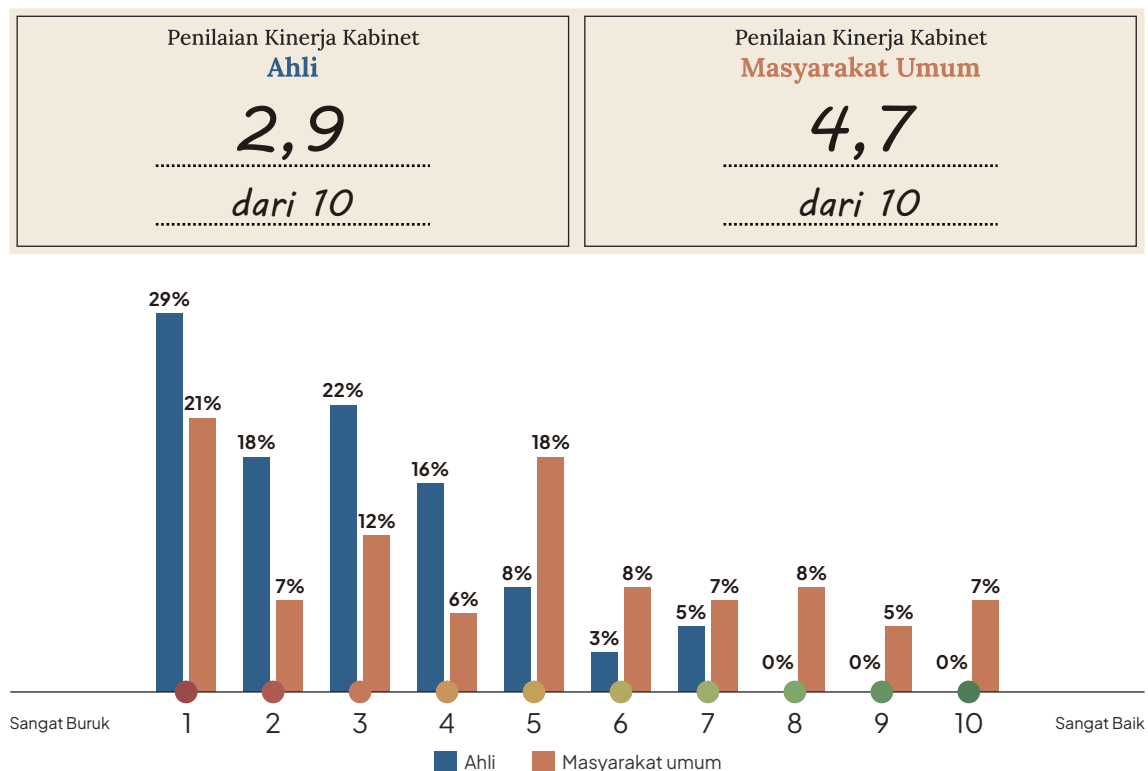
3.4. Rapor Kabinet Merah Putih

▲ Rapor kinerja Kabinet Merah Putih memperoleh nilai rata-rata 2,9 dari 10 menurut ahli dan 4,7 dari 10 menurut masyarakat umum, yang mencerminkan rendahnya persepsi terhadap kinerja dua tahun pemerintahannya.

Sebanyak 69% responden ahli memberikan nilai 1 hingga 3 terhadap kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran (Gambar 4), dengan nilai 3 (22%) dan nilai 2 (18%) dan nilai terendah dalam skala penilaian yaitu 1 (29%). Hal ini memiliki makna kinerja Kabinet Merah Putih sangatlah buruk. Sebaliknya, responden yang memberikan nilai 8 hingga 10 atau memiliki persepsi bahwa kinerja Prabowo–Gibran selama 2 tahun ini ‘sangat baik’ kecil proporsinya, sehingga baik dari masyarakat umum dan ahli, memiliki persepsi bahwa kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran dalam 2 tahun terakhir adalah ‘sangat buruk’ dan ‘buruk’. Pada bagian survei masyarakat umum, 40% responden memberikan nilai 1 hingga 3 untuk Kabinet Merah Putih, dua kali lipat dari responden yang memberikan nilai 8 hingga 10 (20%).

Gambar 4

Penilaian Kinerja 2 Tahun Kabinet Prabowo–Gibran



Sumber:

Survei Masyarakat Umum (N=1.142), dan Ahli (N = 129), diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan "Bagaimana Anda menilai kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran secara keseluruhan selama dua tahun terakhir?"

4

Rapor Kinerja Sektorial Oleh Kabinet Bayangan

Catatan Evaluasi Wali Kelas Selama 2 Tahun Bekerja

Arti skor 1-10 Kinerja Menteri Kabinet Merah Putih versi Kabinet Bayangan

- 1 Ananda diragukan ijazah sekolah sebelumnya
- 2 Ananda tidak layak jadi pemimpin negara
- 3 Ananda terlalu sering mencontek
- 4 Ananda lupa belajar karena terlalu sering keluar negeri
- 5 Ananda dinyatakan tidak lulus memimpin negeri ini
- 6 Ananda perlu mendengarkan orang lain agar tidak merasa paling benar
- 7 Ananda memiliki kemampuan tapi bisa lebih baik kinerjanya
- 8 Ananda menunjukkan bakat memimpin
- 9 Ananda sangat layak menjadi ketua kelas
- 10 Ananda adalah sosok yang nyaris sempurna



Tabel 1

Dimensi Paling Menentukan dalam Penilaian Kinerja Menteri

	Apa yang Menjadi Masalah?	Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?	Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?	Solusi yang Seharusnya Dilakukan
Menteri Sekretaris Negara				
Menteri Kabinet Bayangan				
 Feri Amsari				
Menteri Kabinet Merah Putih				
 Prasetyo Hadi (Mensesneg)	1 Kewenangan antarlembaga belum tertata, sehingga masih tumpang tindih.	1 Membiarkan setiap lembaga bekerja serabutan, tanpa tata kelola yang benar.	1 Kebijakan tidak berdasarkan UUD, UU, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Program dijalankan tanpa uji coba (<i>piloting</i>) dan tanpa alat ukur ilmiah yang tegas: Bappenas tidak dilibatkan, kebijakan yang dituangkan dalam UU tidak disertai naskah akademik, dan kebijakan serta tindakan Presiden atas programnya tidak berbasis UU dan partisipasi publik. Keputusan diambil tiba-tiba dan tidak tercantum dalam program pembangunan nasional.	1 Presiden harus taat kepada konstitusi, hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik
 Listyo Sigit Prabowo (Kepala Staf Kepresidenan, sejak 1 Okt 2026; menggantikan Dudung Abdurachman)	2 Administrasi istana terlalu birokratis.	2 Mensesneg tidak mampu mengelola penyelenggaraan negara dengan baik, karena pelanggarnya adalah Presiden sendiri.		
 Muhammad Qodari (Kepala Badan Komunikasi Pemerintah)	3 Komunikasi istana terlalu banyak pintu. 4 Istana tidak terbuka dan tidak profesional dalam membentuk peraturan perundang-undangan. 5 Cara istana menampung aspirasi publik buruk. 6 Kebijakan tidak terbuka, dan tindakan pemerintah tidak menyentuh kesejahteraan publik serta hak warga negara.			
Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim				
Menteri Kabinet Bayangan				
 Iqbal Damanik				
Menteri Kabinet Merah Putih				
 Moh. Jumhur Hidayat (Menteri LH/ Kepala BPLH)	1 Komitmen pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) rendah.	1 Mengabaikan peringatan El Nino dan kemarau panjang dari BMKG dan Kemenkes, lalu baru bereaksi setelah karhutla terjadi: menerbitkan Inpres No. 11/2026 (31 Agustus 2026), mengerahkan modifikasi cuaca, water bombing, helikopter, dan pesawat, meminta inovasi "ubi bombing" (tepung singkong pengganti air), serta menetapkan 138 tersangka (per 7 September 2026).	1 Penanganannya hanya kuratif, padahal karhutla sudah berulang lebih dari 20 tahun. Tanpa mitigasi, area terbakar meluas; asapnya merusak kesehatan warga dan satwa, memperparah krisis iklim, dan mengancam target FOLU Net Sink 2030. Kerugian ekonominya mencapai Rp123,1 triliun (Celios, 2026).	1 Menyusun strategi pencegahan karhutla, karena Inpres hanya mengikat internal pemerintah dan tidak cukup kuat menjerat korporasi. Data tersangka dan proses hukumnya perlu dibuka ke publik, disertai investasi pada teknologi dan riset penanggulangan karhutla.
 Bahliil Lahadalia (Menteri ESDM; sejak 1 Okt 2026 juga Menko Hilirisasi dan Transisi Energi)	2 Indonesia terjebak ketergantungan pada energi fosil (<i>carbon lock-in</i>). 3 Proyek transisi energi mengabaikan keadilan, kesetaraan, dan inklusi sosial. 4 Proyek pemerintah memicu konflik lahan yang melanggar hak masyarakat adat.	2 Merespons gejolak Selat Hormuz dengan	2 B50 hanya memindahkan krisis: butuh tambahan CPO hingga ±16 juta ton/tahun (dari 12 juta ton di B40),	2 Menuangkan komitmen lepas dari energi fosil dalam regulasi yang mengikat dan konsisten hingga tingkat teknis, karena PLN dan pemerintah masih mencari
 Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan)				

Apa yang Menjadi Masalah?		Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?	Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?	Solusi yang Seharusnya Dilakukan
 Nusron Wahid (Menteri ATR/ Kepala BPN)	Nilai 3/10	memperluas mandatori biodiesel dan mengoptimalkan kilang (target stop impor bensin oktan menengah-tinggi pada 2027), menargetkan 100% listrik EBT dalam 10 tahun, meluncurkan proyek PLTS 100 GW, dan menerbitkan Strategi Transisi Energi Berbasis Kewilayahan Menuju 2045. 3 Menargetkan tambahan 5,2 GW panas bumi dalam RUPTL 2025–2034. Proyek panas bumi dan hilirisasi nikel tetap berjalan tanpa partisipasi warga (Magdalene, 2026), termasuk yang berdampak pada perempuan adat di Raja Ampat (Greenpeace, 2025). Izin tambang di Raja Ampat baru dicabut setelah ditekan publik. 4 Menjalankan PSN di atas tanah adat, seperti <i>Food & Energy Estate</i> Papua Selatan (Merauke, Boven Digoel, Mappi), PLTP Ulumbu–Poco Leok (NTT), nikel Raja Ampat (Manyaifun & Batang Pele), dan Rempang Eco-City (Batam), lalu mengerahkan militer untuk mengamankan proyek dan mengkriminalisasi warga yang menolak.	yang menurut Yayasan Madani bisa memperluas sawit lebih dari 6 juta hektare. Koalisi Transisi Bersih memperkirakan deforestasi hingga 1,5 juta hektare dan risiko krisis minyak goreng seperti 2022. Target 100% EBT juga bertolak belakang dengan RUPTL 2025–2034 PLN yang masih memberi porsi besar pada gas dan batu bara. Strategi kewilayahan bisa jadi bencana jika tidak dikonsultasikan dengan warga dan pemda, mengingat kendala lahan, daya tampung, fiskal, dan SDM. 3 Proyek tanpa partisipasi warga melanggar prinsip demokrasi dan berisiko salah sasaran. Warga kehilangan sumber penghidupan, bahkan terancam kesehatan dan nyawanya, seperti pada kebocoran gas H₂S di PLTP Mandailing Natal. 4 Perampasan tanah adat dengan cara militeristik melanggar Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (hutan adat bukan hutan negara) serta UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I. TNI/Polri yang dipakai “mengamankan investasi” keluar dari mandat konstitusionalnya dan merusak supremasi sipil. Represi juga merusak iklim investasi karena investor berstandar ESG menanggung	pembangkit fosil baru. Strategi kewilayahan perlu dijadikan regulasi, disertai kewenangan konservasi energi bagi pemda dan partisipasi warga. 3 Merancang transisi energi yang menjamin hak masyarakat adat, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan, agar manfaatnya tidak hanya dinikmati segelintir orang. 4 Mengembalikan militer ke barak dan mencabut seluruh keterlibatannya dalam PSN, serta segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk menjamin hak atas tanah dan hutan adat.

	Apa yang Menjadi Masalah?	Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?	Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?	Solusi yang Seharusnya Dilakukan
Menteri Pendidikan & Kebudayaan Menteri Kabinet Bayangan  Iman Zanatul Haeri Menteri Kabinet Merah Putih  Abdul Mu'ti (Mendikdasmen) Nilai 6/10  Brian Yulianto (Mendiksisaintek) Nilai 4/10  Fadli Zon (Menteri Kebudayaan) Nilai 5/10  Sugiono (Menko PMK, sejak 1 Okt 2026; menggantikan Pratikno) Nilai 2/10	1 Kualitas pembelajaran. 2 Alokasi anggaran pendidikan. 3 Biaya pendidikan. 4 Kesejahteraan dan kompetensi guru & dosen. 5 Sistem pendidikan dan pembagian kewenangan pusat–daerah.	1 Membagikan TV interaktif (<i>Interactive Flat Panel</i>) ke sekolah. 2 Mengalokasikan anggaran pendidikan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan sekolah khusus (Sekolah Rakyat, SMA Unggul Garuda, Sekolah Nasional Terintegrasi). 3 Mengandalkan KIP, PIP, beasiswa, dan penetapan penerima berdasarkan desil. 4 Mengangkat PPPK paruh waktu dan memberi bantuan insentif untuk guru non-ASN. 5 Menarik urusan pendidikan ke pusat (sentralisasi).	risiko reputasi, dan justru menambah biaya sosial-politik proyek. 1 Tidak sesuai kebutuhan. Kebutuhan dasar justru belum terpenuhi: sumber belajar dan buku perpustakaan, ketersediaan guru (terutama di daerah 3T), peningkatan kualitas guru, dan fasilitas pendidikan yang layak. 2 Kebutuhan dasar pendidikan terabaikan: dana BOS tidak lagi sesuai standar pembiayaan, MBG menimbulkan kasus keracunan, dan gaji guru (PNS, PPPK, PPPK paruh waktu, honorer) makin kecil. Sekolah Rakyat, SMA Unggul Garuda, dan SNT dirancang tanpa kajian kebutuhan dan tidak mengacu pada RPJMN–RPJPN, sehingga tata kelola pendidikan jadi multisistem. 3 Jumlah penerima KIP, PIP, dan beasiswa terus turun. Perubahan desil juga membuat banyak siswa kehilangan hak KIP dan PIP. 4 Guru sekolah/madrasah negeri: jenjang karier makin sempit, tunjangan makin kecil. Guru sekolah/madrasah swasta: tidak punya jaminan upah minimum. 5 Anggaran pendidikan untuk daerah menyusut dan gaji guru di	1 Perbaikan kesejahteraan guru, dosen dan tenaga pendidik. Memastikan fasilitas belajar secara merata di seluruh Indonesia sehingga akses pendidikan gratis terbuka lebar untuk semua anak Indonesia. Memiliki ukuran yang jelas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui perbaikan kesejahteraan guru, pelatihan dan beragam intervensi untuk meningkatkan kompetensi guru dan dosen serta kualitas pembelajarannya. Menyediakan guru dan dosen berkualitas secara merata di seluruh Indonesia termasuk daerah 3T. Membuat laboratorium sekolah dan universitas terbaik di daerah 3T sehingga kualitas pendidikan tidak terpusat di pulau Jawa saja. 2 Mengalokasikan anggaran Pendidikan kepada kebutuhan dasar pendidikan terabaikan. 3 Tekan biaya Pendidikan dan ambil alih oleh pemerintah untuk menekan pembiayaan Pendidikan yang dikeluarkan Masyarakat.

Apa yang Menjadi Masalah?		Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?	Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?	Solusi yang Seharusnya Dilakukan
			daerah makin kecil. Masalah pendidikan dan guru di daerah tidak jadi prioritas pemerintah pusat.	4 Kesejahteraan dan kualitas dosen ditentukan oleh keberpihakan anggaran dan kebijakan di level Pendidikan tinggi serta Pendidikan dasar menengah. Tetapkan upah minimum guru dan dosen.
				5 Tidak semua urusan Pendidikan harus dikelola oleh pusat atau tersentralisasi.
Menteri Perekonomian				
Menteri Kabinet Bayangan				
	Media Wahyudi Askar			
Menteri Kabinet Merah Putih				
	Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian)	Nilai 3/10	1 Meneken ART pada 19 Februari 2026: tarif 19% ditukar dengan bea nol untuk 99% produk AS, penghapusan TKDN bagi perusahaan AS, dan penyesuaian standar ke aturan AS.	1 Membatalkan kesepakatan ART.
	Rosan Roeslani (Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM; CEO Danantara)	Nilai 3/10	2 Investasi dan Hilirisasi: investasi besar, tetapi lapangan kerja yang tercipta sedikit.	2 Menerapkan larangan dana publik menanggung kerugian (<i>public money first-loss prohibition</i>): Danantara tidak boleh memakai aset publik untuk menyelamatkan investasi gagal tanpa persetujuan DPR. Sebagian hasil investasi otomatis kembali ke APBN dengan formula tetap, bukan keputusan tahunan. Pisahkan pemilik aset, regulator, dan pengelola investasi agar kekuasaan tidak menumpuk di satu lembaga, dan segera terbitkan laporan tahunan.
	Ferry Juliantono (Menteri Koperasi)	Nilai 3/10	3 Koperasi: ekonomi desa lemah dan rantai distribusi panjang.	3 Baru sekitar 4% koperasi yang berjalan. Sekitar dua pertiga Dana Desa terikat cicilan selama enam tahun, dan desa termiskin justru mencatat transaksi terendah.
	Maman Abdurrahman (Menteri UMKM)	Nilai 3/10	4 UMKM: banyak kredit macet dan sulit memperoleh kredit baru.	4 Realisasinya hanya sekitar 67.000 debitur. Kredit UMKM hanya tumbuh 2,38%, sementara NPL UMKM naik menjadi 4,62%.
	Budi Santoso (Menteri Perdagangan)	Nilai 4/10	5 Perdagangan: ekspor komoditas rawan <i>under-invoicing</i> ; impor tumbuh 19,94%, sementara ekspor hanya 4,43%.	5 Jika DSI menjadi pembeli, risiko harga berpindah ke negara dan rantai pasok makin panjang. Belum ada bukti publik bahwa harga atau devisa membaik.
	Dony Oskaria (Kepala BP BUMN; COO Danantara)	Nilai 3/10	2 Memusatkan pengelolaan aset dan dividen BUMN di Danantara, sekaligus memperluas peran Danantara sebagai investor lewat berbagai proyek dan konsolidasi aset.	
	Widiyanti Putri Wardhana (Menteri Pariwisata)	Nilai 3/10	3 Membentuk sekitar 83.380 koperasi dari atas. Setiap unit boleh berutang hingga Rp3 miliar ke Himbara, dengan cicilan dipotong dari Dana Desa.	3 Menghentikan KDMP dan membangun pendekatan ekonomi berbasis kemandirian desa.
	Muhammad Sarmuji (Menteri Perindustrian, sejak 1 Okt 2026; menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita)	Nilai N/A	4 Menjanjikan hapus tagih kredit macet bagi satu juta debitur.	4 Mengembangkan kredit tanpa agunan berbasis data transaksi digital
			5 Mengalihkan ekspor batu bara, sawit, dan ferroalloy ke PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sejak 1 Juni 2026.	5 Pemerintah cukup mengawasi kontrak tanpa ikut berdagang, disertai digitalisasi dan

Apa yang Menjadi Masalah?		Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?	Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?	Solusi yang Seharusnya Dilakukan
 Teuku Riefky Harsya (Menteri Ekonomi Kreatif) Nilai 4/10		6 Mengalihkan sekitar Rp90 triliun dividen per tahun ke Danantara, memberi pinjaman Rp6,65 triliun ke Garuda, dan merangkap jabatan Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara. 7 Menaikkan target menjadi 19,1 juta wisman pada 2027, sementara anggaran program dipangkas hingga 65%.	6 APBN 2026–2027 kehilangan dividen saat utang pemerintah mencapai Rp10.293 triliun. Risiko utang Whoosh kembali ke Kemenkeu, sementara Danantara menolak setoran Rp120 triliun. Laba dipindahkan ke Danantara, tetapi kerugian berpotensi tetap ditanggung negara. 7 Kunjungan naik 7,68%, tetapi devisa hanya naik 2,88%; jumlah wisatawan tumbuh lebih cepat daripada nilai ekonominya.	verifikasi dokumen ekspor serta penegakan hukum. 6 Memisahkan secara tegas regulator dan operator BUMN, serta meninjau ulang beban utang Whoosh. 7 Menerapkan izin wisata premium berkuota dengan bagi hasil setidaknya 15% untuk desa sekitar, serta pungutan wisata (<i>tourism levy</i>) yang dikurangi untuk konservasi.
Menteri Keuangan & Tata Kelola Anggaran Menteri Kabinet Bayangan  Bhima Yudhistira Adhinegara Menteri Kabinet Merah Putih  Suahasil Nazara (Menkeu, sejak 14 Sep 2026; menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, Menkeu saat kebijakan di kolom G diambil) Nilai 5/10	1 Kemampuan membayar utang melemah. 2 Perencanaan belanja buruk. 3 Rasio pajak rendah. 4 Efisiensi anggaran daerah justru kontraproduktif. 5 Pengambilalihan utang kereta cepat Whoosh. 6 Insentif pajak boros dan tidak tepat sasaran.	1 Menambah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) global. 2 Menggeser anggaran di tengah tahun berjalan. 3 Mengganti skema PPh UMKM dan “berburu di kebun binatang” (mengejar pajak dari wajib pajak yang sudah ada). 4 Pemerintah pusat memberi bantuan dana ke pemda. 5 Membayar utang Whoosh dengan APBN. 6 Menambah insentif pajak untuk hilirisasi tanpa evaluasi.	1 Pembayaran bunga utang sudah menyedot 24% penerimaan pajak, dan tren suku bunga makin tinggi. Ruang fiskal makin sempit, sementara pemerintah makin bergantung pada surat utang, yang mencapai 88% dari total utang, sebagai sumber utama pembiayaan defisit. 2 Demi membiayai program prioritas seperti MBG dan Kopdes Merah Putih, pemerintah menggeser APBN tanpa persetujuan DPR. Ini bertentangan dengan Putusan MK No. 100/PUU–XXIV/2026, yang menegaskan pergeseran alokasi anggaran harus dibahas terbuka dan tidak bisa hanya berdasar lampiran UU APBN. Pergeseran di tengah jalan juga memicu kekhawatiran pemangkasan	1 Hentikan program MBG dan Kopdes MP. 2 Lakukan renegotiasi utang termasuk <i>debt swap</i> dan <i>debt cancellation</i> (penghapusan utang). 3 Kembalikan aturan PPh Final UMKM 0,5% dan turunkan PPN dari 11% ke 8%. 4 Utang kereta cepat diselesaikan dengan penghapusan utang bukan menggeser beban ke APBN. 5 Pertajam insentif fiskal ke industri padat karya dan cegah kebocoran pajak dihilirisasi mineral.

Apa yang Menjadi Masalah?	Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?	Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?	Solusi yang Seharusnya Dilakukan
		anggaran daerah dan pendidikan makin besar mulai 2027. 3 UMKM yang sebelumnya membayar PPh final 0,5% dari omzet kini ditekan membayar PPh dengan tarif normal yang lebih tinggi. Akibatnya, UMKM yang sedang bertahan hidup (<i>survival mode</i>) makin tertekan oleh perburuan pajak di kebun binatang. 4 Memindahkan beban utang kereta cepat dari BUMN ke APBN adalah bentuk nyata jebakan utang (<i>debt trap</i>). Proyek yang secara ekonomi memberatkan akhirnya dibayar dengan pajak rakyat. 5 Industri pengolahan menerima belanja perpajakan Rp130 triliun setiap tahun, tetapi daya dorong pertumbuhan terhadap penerimaan pajak (<i>tax buoyancy</i>) makin melemah. Artinya, makin tinggi pertumbuhan ekonomi, makin rendah elastisitas tambahan penerimaan pajaknya. Insentif pajak diobral tanpa evaluasi dan minim hasil dari sisi penyerapan tenaga kerja.	
Menteri Riset, Teknologi & Digital Menteri Kabinet Bayangan  Nenden Sekar Arum	1 Judi online dan penipuan digital. 2 Keamanan data rentan. 3 Aturan penggunaan AI.	1 Memblokir situs dan akun judol, serta mewajibkan registrasi kartu SIM dengan biometrik/pengenalan wajah. 1 Blokir situs hanya bersifat reaktif dan tidak efektif di dunia digital yang terus berubah. Cara ini menghabiskan sumber daya, tetapi tidak menyentuh	1 Hentikan pengawasan biometrik dan pemblokiran situs reaktif dan alihkan fokus pada pemblokiran infrastruktur



		Apa yang Menjadi Masalah?	Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?	Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?	Solusi yang Seharusnya Dilakukan
Menteri Kabinet Merah Putih					
 Brian Yulianto (Mendiktisaintek)	Nilai 6/10	4 Hoaks dan disinformasi. 5 Perlindungan anak di dunia online. 6 Indonesia masih memiliki ekosistem riset yang terfragmentasi.	2 Menyusun aturan turunan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) dan mengimbau warga, misalnya membatasi pengambilan foto/video di ruang publik. 3 Menerbitkan peta jalan dan pedoman etika AI. 4 Moderasi konten berlebihan, pemantauan otomatis lewat mesin AIS, dan permintaan penurunan konten (take-down) besar-besaran. 5 Mewajibkan verifikasi usia pengguna media sosial/PSE. 6 Mendorong hilirisasi riset melalui peningkatan pendanaan dan kolaborasi dengan industri.	bandar besar, jaringan <i>payment gateway</i> , dan pencucian uangnya. Kewajiban data biometrik juga memperluas pengawasan massal tanpa jaminan keamanan. 2 UU PDP seharusnya berlaku penuh sejak akhir 2024, tetapi jadi aturan pasif karena Lembaga Pengawas PDP yang independen tak kunjung dibentuk. Akibatnya, tidak ada lembaga yang berwenang memberi sanksi. Komdigi malah melempar beban keamanan data ke warga (misalnya imbauan tidak memotret di ruang publik), padahal kebocoran data terbesar terjadi di infrastruktur kritis negara dan korporasi. 3 Teknologi AI berkembang jauh lebih cepat daripada birokrasi membuat aturan. Dokumen yang ada hanya imbauan yang tidak mengikat (<i>soft law</i>), tanpa akibat hukum bagi pelanggar. 4 Pemerintah menjadikan dirinya "wasit tunggal kebenaran". Ini merusak ruang publik digital, membuat narasi politik dikontrol, dan kebijakan publik jadi kurang transparan. Moderasi berlebihan juga membuat warga menyensor diri sendiri karena takut dipidana.	finansial (<i>follow the money</i>) serta pembekuan <i>payment gateway</i> bersama OJK/PPATK. 2 Segera resmikan Otoritas Pengawas PDP independen agar bisa menjatuhkan sanksi hukum, serta wajibkan audit berkala pada infrastruktur kritis negara alih-alih menyalahkan warga. 3 Terbitkan hukum mengikat berbasis tingkat risiko (<i>risk-based regulation</i>) dan fasilitasi <i>regulatory sandbox</i> agar aturan hukum mengikat tanpa mematikan inovasi lokal. 4 Menentukan standar moderasi konten yang rigid dan adil, serta membuka data seluruh permintaan <i>take-down</i> konten yang diajukan pemerintah ke platform digital kepada publik melalui Laporan Transparansi berkala. 5 Dorong platform digital untuk menerapkan prinsip <i>Safety by Design</i> pada platform digital dan gunakan teknologi Zero-Knowledge Proofs untuk verifikasi usia tanpa mengorbankan privasi dan anonimitas warga. 6 Bangun strategi kedaulatan teknologi nasional yang mengintegrasikan riset, IP, talenta,
	Nilai 4/10				
 Meutya Hafid (Menteri Komunikasi dan Digital)					

Apa yang Menjadi Masalah?	Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?	Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?	Solusi yang Seharusnya Dilakukan
		5 Untuk mengecek usia, identitas semua pengguna media sosial harus diperiksa (misalnya unggah KTP atau pindai wajah). Akibatnya, hak privasi dan anonimitas seluruh warga di internet hilang. 6 Fokus pada jumlah riset, prototype, dan mitraan belum menyelesaikan masalah utama di mana Indonesia belum memiliki kapasitas kuat untuk menguasai, memproduksi, dan menskalakan teknologi sendiri.	6 infrastruktur teknologi, industri, pembiayaan, dan procurement pemerintah untuk beberapa teknologi strategis nasional.
Menteri Kesehatan Menteri Kabinet Bayangan  Irma Hidayana Menteri Kabinet Merah Putih  Budi Gunadi Sadikin (Menkes) Nilai 3/10	1 Kritik dibungkam. Siapa saja, baik dari nakes, guru besar bidang kesehatan, maupun siapa saja yang mengkritik Menkes. 2 UU Kesehatan (Omnibus Law) No. 17/2023 membawa kemunduran berantai di sektor kesehatan, misalnya sentralisasi pengadaan, perpanjangan izin praktik nakes/nadis, pendidikan nakes/nadis, dan kolegium kedokteran. 3 Perlindungan kesehatan (BPJS) untuk pasien dan nakes lemah. 4 Terlalu banyak gimik dan meninggalkan kebijakan kesehatan masyarakat yang berbasis bukti. 5 Pengambilan keputusan tidak	1 Tidak ada. Kemenkes justru membungkam kritik secara formal, misalnya dengan mencopot jabatan sejumlah dokter. 1 Pemerintah ingin menguasai semua lini sektor kesehatan lewat aturan yang membatasi kebebasan individu, organisasi profesi, dan kolegium. Akibatnya, seluruh ASN, PNS, dan pekerja kesehatan dipaksa patuh pada aturan yang justru merugikan mereka. 2 BGS adalah menteri titipan politik, sehingga kebijakannya lebih mementingkan kepentingan politik golongan daripada kesehatan masyarakat. Menkes juga tidak punya pendidikan formal maupun pengalaman panjang di bidang kesehatan.	1 Menkes BGS diganti dengan Menkes yang berlatar belakang pendidikan dan pengalaman mendalam di bidang kesehatan 2 Mengamandemen UU Omnibus Law Kesehatan No. 17/2023 dengan memasukkan anggaran minimal kesehatan, mengembalikan independensi kolegium, memperkuat & menyeimbangkan desentralisasi sektor kesehatan, menghapus semua ketentuan terkait privatisasi sistem kesehatan. 3 Memperkuat perlindungan nakes dan pasien juga faskes melalui dukungan anggaran dan tata kelola BPJS yang kuat.

	Apa yang Menjadi Masalah?	Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?	Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?	Solusi yang Seharusnya Dilakukan
	partisipatif, penyelesaian kekurangan dokter berfokus pada angka dan bombastisitas program (ambulans terbang dst, nambah FK dengan cepat namun tidak mempertimbangan kompetensi dan kualitas pendidikan)			4 Percaya pakar, gunakan langkah partisipasi yang bermakna dalam setiap pengambilan keputusan. 5 Mengoreksi semua keputusan penambahan FK dengan tidak mengkompromikan kompetensi pendidikan kedokteran.
Menteri Sosial & Layanan Dasar Menteri Kabinet Bayangan  Nabiyila Risfa Izzati Menteri Kabinet Merah Putih  Saifullah Yusuf (Mensos) Nilai 4/10  Muhaimin Iskandar (Menko Pemberdayaan Masyarakat) Nilai 4/10  Wihaji (Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN) Nilai 4/10  Yassierli (Menaker) Nilai 4/10  Mukhtarudin (Menteri P2MI) Nilai 4/10  Dody Hanggodo (Menteri PU) Nilai 3/10  Maruarar Sirait (Menteri PKP) Nilai 4/10	1 Isu dan program prioritas tidak jelas karena ditentukan oleh keinginan sepihak Presiden, bukan kebutuhan. 2 Tidak ada mekanisme oposisi, sehingga pemerintahan berjalan tanpa pengawasan. 3 Pemerintah anti-pakar dan anti-kritik. 4 Kabinet terlalu gemuk dan alokasi anggaran tidak proporsional. 5 Data buruk, contohnya masalah desil yang sangat memengaruhi hajat hidup orang banyak.	1 Kebanyakan menteri menjadi "yes man" yang menjalankan semua arahan Presiden tanpa pertimbangan, bukan mitra yang membantu Presiden memahami persoalan. Akibatnya banyak isu tidak terselesaikan, ditambah kewenangan yang tumpang tindih karena jumlah menteri terlalu banyak.	1 Data dan desil: tumpang tindih data tidak dibereskan, sehingga polemik desil tak kunjung selesai. 2 RUU Ketenagakerjaan (Menaker): Kemnaker gagal membangun dialog yang konstruktif antar-pemangku kepentingan, sehingga partisipasi bermakna tidak tercapai dan UU terasa buru-buru disahkan demi formalitas. 3 Menteri P2MI: programnya tidak jelas, mungkin karena anggarannya tidak diprioritaskan. 4 Menteri PU: banyak kontroversi (misalnya soal mutasi), tetapi capaiannya tidak jelas. 5 Menteri PKP: banyak rencana disampaikan, tetapi realisasinya belum terlihat.	1 Data dan desil: jelaskan kebijakan desil kepada publik dan tunda dulu kebijakan terkait desil yang langsung merugikan warga, misalnya pencabutan bansos. 2 RUU Ketenagakerjaan: buka draft UU Perlindungan Ketenagakerjaan, libatkan pemangku kepentingan dan jangan hanya mengejar target waktu tanpa partisipasi bermakna.

	Apa yang Menjadi Masalah?	Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?	Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?	Solusi yang Seharusnya Dilakukan
Menteri Hak Perempuan & Kelompok Marginal Menteri Kabinet Bayangan  Khoirunnisa Nur Agustyati Menteri Kabinet Merah Putih  Arifatul Choiri Fauzi (Menteri PPPA) Nilai 4/10  Natalius Pigai (Menteri HAM) Nilai 4/10	- Partisipasi perempuan di politik masih terhambat diskriminasi, peminggiran, dan kekerasan, termasuk kekerasan politik di ruang digital. - Belum ada perlindungan bagi perempuan pembela HAM. Bahkan secara umum, terdapat intimidasi dan serangan terhadap masyarakat sipil yang aktif menyuarakan kritiknya kepada pemerintahan (terakhir Hafiz BEM UI diserang oleh pihak tidak dikenal, adanya pembubaran diskusi, pengambilan tanah rakyat. - Pemangkasan anggaran KemenPPPA (Inpres 1/2025, dipotong 48,86%) mengganggu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemangkasan dan sentralisasi anggaran daerah juga berdampak sama. - Ketimpangan ekonomi dan ketenagakerjaan. Data LPEM FEB UI 2025: 67,4% buruh perempuan diupah di bawah UMK 2025, sementara buruh laki-laki 54,7%. Laki-laki juga lebih mudah terserap lapangan kerja dibanding perempuan.	- Belum ada solusi maupun rumusan kebijakan yang konkret agar partisipasi politik perempuan lebih bermakna. - Menyediakan call center untuk laporan kekerasan terhadap perempuan. - Mengubah layanan bagi korban menjadi hanya lewat <i>call center</i>. - Program pemberdayaan ekonomi dan kredit khusus perempuan.	- Keterwakilan perempuan di lembaga publik hanya dilihat sebagai angka, bukan upaya membuka ruang publik yang bisa diakses perempuan. - Setelah efisiensi, laporan hanya bisa lewat <i>call center</i>. Cara ini tidak efektif karena tidak memberi perlindungan menyeluruh bagi perempuan pembela HAM. Bahkan, negara kadang ikut melakukan kekerasan terhadap pembela HAM, termasuk perempuan pembela HAM. - Anggaran dipangkas untuk membiayai PSN yang lebih populis. Dampaknya sampai ke daerah, misalnya biaya visum korban kekerasan seksual tidak lagi ditanggung BPJS, padahal sebelumnya ditanggung pemda. - Program ini sulit dijalankan karena anggaran dipangkas.	- Pelibatan perempuan dalam pembangunan seharusnya tidak sekadar menggugurkan kewajiban saja. Tetapi harus bersanding dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan karena tujuannya adalah untuk mengubah perspektif dan pembangunan bisa mengarusutamakan gender. - Meningkatkan anggaran untuk penanganan kekerasan perempuan dan penyediaan ruang aman bagi korban untuk melaporkan dan mendapatkan perlindungan baik fisik maupun mental. - Memastikan UU pemilu dan UU parpol semakin inklusif. - Perlindungan dan penghormatan terhadap ruang sipil.



	Apa yang Menjadi Masalah?	Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?	Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?	Solusi yang Seharusnya Dilakukan
Menteri Hukum & Kebijakan Negara Menteri Kabinet Bayangan  Yance Arizona Menteri Kabinet Merah Putih  Yusril Ihza Mahendra (Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan) Nilai 4/10  Supratman Andi Agtas (Menteri Hukum) Nilai 4/10  Agus Andrianto (Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan) Nilai 2/10  Rini Widyantini (Menteri PANRB) Nilai 3/10  ST Burhanuddin (Jaksa Agung) Nilai 2/10	1 Pemberantasan korupsi. 2 Sinergi antarlembaga penegak hukum. 3 Warga yang mempertahankan tanahnya dikriminalisasi. 4 Penertiban kawasan hutan. 5 Ketidakadilan yang dialami masyarakat kecil.	1 Menyiapkan RUU Perampasan Aset. 2 Menjadikan Kejaksaan lembaga utama pemberantasan korupsi. 3 Penegakan hukum dan keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>). 4 Membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan dengan pendekatan militeristik. 5 Menteri Hukum membuat program "Pasti Ada Solusi Bersama Menteri Hukum" setiap Jumat.	1 Aturan yang sudah ada (UU Tipikor dan UU TPPU) belum dimaksimalkan. Cakupan RUU Perampasan Aset terlalu luas sehingga Kejaksaan mendapat kewenangan berlebihan, yang justru membuka peluang korupsi dalam penegakan hukum. RUU ini juga mengabaikan prinsip proses hukum yang adil (<i>due process of law</i>). 2 Pemberantasan korupsi dipakai untuk menyasar oposisi politik. Di sisi lain, ada pejabat kejaksaan yang korup dan KPK makin dilemahkan. 3 Akar masalahnya, yaitu konflik kepemilikan tanah, tidak diselesaikan. Pengakuan atas hak rakyat dan masyarakat adat juga masih lemah. 4 Kebun sawit dikumpulkan Satgas lalu diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara, tetapi akar masalahnya (konflik perusahaan dengan masyarakat dan kerusakan lingkungan) tidak diselesaikan. Tidak ada pemulihan hutan yang rusak untuk menjaga daya dukung lingkungan. 5 Acara ini hanya jadi tontonan. Tidak ada solusi langsung dengan pendekatan teknis untuk masalah hukum dan ketidakadilan yang dihadapi warga.	1 Membuat aturan untuk mencegah konflik kepentingan, yang menjadi cikal bakal korupsi. 2 Merevisi UU KPK untuk memulihkan independensi KPK. 3 Segera mengesahkan UU Masyarakat Adat. 4 Merevisi UU Bantuan Hukum agar akses bantuan hukum lebih luas, bukan hanya untuk warga miskin, tetapi juga warga yang menghadapi konflik struktural. Dana bantuan hukum juga perlu ditambah.



	Apa yang Menjadi Masalah?	Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?	Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?	Solusi yang Seharusnya Dilakukan
Menteri Dalam Negeri & Keamanan Negara Menteri Kabinet Bayangan  Armand Suparman Menteri Kabinet Merah Putih  Muhammad Tito Karnavian Nilai 3/10 (Mendagri)  Dudung Abdurachman Nilai 1/10 (Menko Polkam, sejak 1 Okt 2026; menggantikan Djamari Chaniago)  Suyudi Ario Seto Nilai 1/10 (Kapolri, sejak 1 Okt 2026; menggantikan Listyo Sigit Prabowo)  Yandri Susanto Nilai 2/10 (Menteri Desa dan PDT)	1 Beban ASN/PPPK makin berat bagi daerah. 2 Ruang gerak (diskresi) pemda makin sempit. 3 Korupsi kepala daerah. 4 Ketahanan ekonomi lemah. 5 Pembangunan infrastruktur daerah mandek akibat pemangkasan TKD.	1 Menata ASN/PPPK, membatasi formasi, dan mewacanakan penarikan pembiayaan atau pengelolaan tenaga tertentu ke pusat (resentralisasi). 2 Memperketat earmarking, belanja wajib (<i>mandatory spending</i>), prioritas nasional, dan pengendalian APBD. 3 Menaikkan gaji kepala daerah dan pilkada lewat DPRD. 4 Membentuk Koperasi Desa Merah Putih. 5 Menerbitkan Inpres Infrastruktur.	1 Memindahkan beban tidak sama dengan menyelesaikan masalah. Jika urusan ditarik ke pusat tanpa membenahi pembagian kewenangan dan pembiayaan, yang terjadi hanya resentralisasi fiskal tanpa pembenahan fungsi. 2 APBD berubah jadi "anggaran instruksi" karena makin banyak dana yang penggunaannya sudah ditentukan. 3 Selama kewenangan besar, pengawasan lemah, dan penegakan hukum tidak pasti, berapa pun gajinya tidak akan mencegah korupsi. Biaya politik juga tidak hilang, hanya pindah arena: dari membeli dukungan pemilih menjadi potensi transaksi dengan elite, anggota DPRD, atau partai. Ini bahkan bisa memperkuat penguasaan elite (<i>elite capture</i>) dan oligarki lokal. 4 Desa sudah punya pemerintah desa, BUM Desa, kelompok tani, UMKM, kelompok usaha, dan lembaga ekonomi lain. Koperasi baru berisiko tumpang tindih dan memicu perebutan fungsi. 5 Jalan yang dibangun (jumlah, kualitas, dan lokasinya) tidak sesuai kebutuhan daerah. Inpres juga tidak memberi kepastian bagi daerah.	1 Bagi beban secara adil: pusat membiayai mandat nasional, daerah mengelola kebutuhan lokal. Gaji PPPK tetap digaji Daerah (APBD) melalui penambahan pada TKD (DAK) sesuai kebutuhan masing-masing Daerah. 2 Kembalikan diskresi fiskal: pusat tetapkan standar, daerah menentukan cara mencapainya. 3 Bangun ekonomi berbasis potensi lokal: desa menentukan usaha, pusat membuka akses modal dan pasar, perkuat BumDes. 4 Pulihkan kapasitas fiskal daerah: TKD berbasis kebutuhan/ketimpangan + DAK afirmatif + pembiayaan daerah.

	Apa yang Menjadi Masalah?	Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?	Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?	Solusi yang Seharusnya Dilakukan
Sekretaris Kabinet Menteri Kabinet Bayangan Ahmad Jilul Qur'ani Farid Menteri Kabinet Merah Putih Teddy Indra Wijaya (Sekretaris Kabinet) Nilai 3/10	- Seskab dijabat perwira TNI aktif, padahal UU TNI hanya membolehkan prajurit aktif mengisi jabatan sipil tertentu. - Fungsi dukungan kebijakan Setkab melemah sejak statusnya diturunkan dari setingkat menteri menjadi di bawah Kemensetneg. - Manajemen kabinet tidak stabil: tujuh kali reshuffle dalam dua tahun, termasuk tiga Menkeu dalam kurang dari dua tahun. - Seskab berperan sebagai juru bicara de facto, bukan pengelola sidang kabinet dan analisis kebijakan.	- Mempertahankan status prajurit aktif, bahkan menaikkan pangkat dari Mayor ke Letkol, dengan dalih Seskab berada di bawah Sekretariat Militer Presiden (Perpres 148/2024). - Menempatkan Setkab di bawah Kemensetneg lewat Perpres 148/2024. - Melakukan reshuffle mendadak tanpa evaluasi kinerja terbuka maupun penjelasan resmi, seperti pencopotan Menkeu Purbaya (14 September 2026). - Membela kebijakan dengan klaim legitimasi elektoral ("96 juta pemilih") dan ikut mengumumkan hasil negosiasi teknis, seperti tarif resiprok AS.	- Supremasi sipil melemah dan muncul preseden bahwa undang-undang bisa diakali dengan Perpres. Posisi di jantung pengambilan keputusan sipil berada dalam rantai komando militer, sehingga konflik loyalitas sulit dihindari. - Presiden kehilangan "dapur kebijakan". Tanpa analisis lintas sektor, program prioritas seperti MBG, Kopdes, dan Sekolah Rakyat lahir tanpa kajian dan saling bertabrakan. - Kesinambungan kebijakan terputus dan kepercayaan pasar turun, misalnya saat Menkeu dicopot di tengah tekanan rupiah. Menteri terdorong bekerja untuk menyenangkan Presiden, bukan mencapai target. - Akuntabilitas kabur karena Setkab, yang seharusnya netral dan teknokratis, ikut dalam pertarungan narasi. Argumen elektoral juga tidak menjawab kritik faktual.	- Seskab dijabat pejabat sipil profesional, atau perwira aktif mundur dari dinas sesuai Pasal 47 UU TNI; hapus dalih struktural dalam Perpres 148/2024. - Mengembalikan Setkab sebagai unit kebijakan (policy unit) setingkat menteri yang wajib menyiapkan analisis dampak lintas sektor dan opsi kebijakan sebelum keputusan sidang kabinet. - Menetapkan kontrak kinerja menteri dengan indikator terukur yang dievaluasi tiap semester dan diumumkan ke publik, agar reshuffle berbasis kinerja. - Menyerahkan fungsi juru bicara kepada satu jubir resmi; Seskab fokus pada manajemen kabinet, notulensi, dan pemantauan tindak lanjut keputusan sidang kabinet yang dapat diaudit.
Menteri Pertahanan Menteri Kabinet Bayangan Curie Maharani Menteri Kabinet Merah Putih Sjafrie Sjamsoeddin (Menhan) Nilai 6/10	Perang konvensional kembali terjadi (terutama di Ukraina, Iran, dan mungkin di Selat Taiwan) dan persaingan negara adidaya makin tajam. Akibatnya, pangan, energi, teknologi, dan sektor lain makin rawan, termasuk bagi Indonesia.	a. Mengerahkan TNI untuk program prioritas nasional seperti kedaulatan pangan, energi, air, dan ekonomi hijau (Asta Cita pilar 2). b. Merevisi UU TNI: operasi militer selain perang ditambah dari 12 jadi 14 (termasuk perlindungan	TNI dialihkan dari peran utamanya sebagai komponen pertahanan negara, sehingga berisiko melemahkan pertahanan dari ancaman negara lain. Menempatkan prajurit aktif di bidang yang tidak mereka kuasai bertentangan dengan profesionalisme	TNI fokus pada profesionalisme, modernisasi alutsista, kesejahteraan prajurit, serta mendukung kemandirian pemenuhan alutsista dari dalam negeri sesuai UU No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

Apa yang Menjadi Masalah?	Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?	Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?	Solusi yang Seharusnya Dilakukan
2 Sebelum 2025, anggaran pertahanan di bawah 1% PDB, jauh di bawah rata-rata dunia (2,5%) dan Indo-Pasifik (1,6–1,7%, data SIPRI). Ini salah satu penyebab modernisasi alutsista tidak tercapai: hanya 65,49% dari target Minimum Essential Force pada akhir 2024. 3 Perwira TNI (kolonel dan jenderal) menumpuk sehingga banyak yang nonjob. 4 Persepsi pemerintah bahwa kekuatan TNI AU tertinggal dari negara lain, kekuatan TNI AL masih kekurangan kapal patroli untuk menjaga laut Indonesia, dan TNI AD belum membentuk Komando Daerah Militer (Kodam) di tujuh belas provinsi.	1 WNI di luar negeri dan pertahanan siber), dan kementerian/lembaga yang boleh diisi prajurit aktif ditambah dari 10 jadi 14 (BNPT, Bakamla, BNPB, BNPP). c. Menempatkan perwira aktif dan purnawirawan di jabatan politik di kementerian dan BUMN. 2 a. Menaikkan anggaran pertahanan bertahap hingga 1,5% PDB. Di RAPBN 2027 mencapai Rp335,3 triliun, lebih dari dua kali lipat Rp139,2 triliun pada 2024. b. Menaikkan porsi pinjaman luar negeri untuk anggaran pertahanan menjadi 25% (rata-rata 2019–2024 hanya 7%) untuk mempercepat pengadaan alutsista. c. Memusatkan anggaran pengadaan dan pemeliharaan alutsista di Kemhan. Sebelumnya tersebar di lima pengguna anggaran (Kemhan, Mabes TNI, dan tiga Mabes Angkatan). 3 a. Merevisi UU TNI untuk memperpanjang masa dinas, misalnya jenderal bintang empat bisa pensiun hingga usia 65 tahun.	1 dan meritokrasi, dan justru memperkecil peluang program Presiden berhasil (perlu dikaji kaitan anjloknya elektabilitas Presiden dengan pengerahan militer besar-besaran di program strategis). Remilitarisasi juga memicu gesekan dengan masyarakat, misalnya TNI dipakai dalam sengketa tanah antara negara dan rakyat. 2 Kenaikan anggaran tidak diiringi transparansi dan akuntabilitas, sehingga risiko korupsi naik, terutama di pengadaan. Contohnya, sebagian besar anggaran pertahanan dititipkan di BA BUN yang sepenuhnya di bawah diskresi Menkeu dan jauh dari pengawasan DPR. Tambahan pinjaman luar negeri untuk alutsista menunjukkan pemerintah lebih memilih impor daripada produk dalam negeri. Ini bertentangan dengan Asta Cita dan membebani fiskal dalam jangka panjang. Keterlibatan agen dalam dan luar negeri dalam pengadaan juga berisiko <i>mark-up</i> dan korupsi, sehingga perlu diatur tegas (lewat perpres maupun permenhan). 3 Kebijakannya paradoks: suplai perwira baru	2 Menegakkan amanat Reformasi untuk transparansi dan akuntabilitas perencanaan, penganggaran dan pengadaan pertahanan. 3 Membenahi pembinaan karier agar merit-based dan bukan berdasarkan nepotisme dengan berpedoman kepada UU Pertahanan Negara. 4 Menempatkan pengadaan alutsista dari luar negeri sebagai bagian dari diplomasi pertahanan yang direncanakan dan dilaksanakan bersama dengan Kementerian Luar Negeri agar sejalan dengan Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif)



Apa yang Menjadi Masalah?	Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?	Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?	Solusi yang Seharusnya Dilakukan
	b. Membuat jabatan baru lewat pengembangan postur TNI, dari Kopassus hingga target 750 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP). c. Mempercepat jenjang karier: untuk menjadi letkol cukup 14 tahun, dari sebelumnya 18 tahun. 4 a. Membeli besar-besaran pesawat angkut, pesawat tempur, dan peralatan pendukung untuk TNI AU, seperti A400M (Airbus) dan Rafale (Dassault Aviation). b. Membeli besar-besaran kapal patroli TNI AL dari galangan terbaik dalam dan luar negeri, termasuk kapal bekas AL asing yang masih layak seperti KRI Brawijaya (eks AL Italia). 5 Membangun 17 Kodam dan merekrut anggota TNI baru secara bertahap hingga 2029.	dipercepat, tapi perwira tinggi lama dipertahankan. Perlu kajian berbasis pemodelan untuk menghitung dampaknya pada profesionalisme, kekompakan, dan daya juang prajurit. Ada indikasi disiplin menurun, yaitu prajurit bisa digerakkan untuk kepentingan politik atau ekonomi tertentu (kasus jaksa agung Febri). Ada pula indikasi kenaikan karier berdasarkan koneksi, bukan merit, seperti promosi jabatan anak Menhan dan Sekretaris Kabinet. 4 Tidak ada strategi pengadaan alutsista yang jelas. Data Lab45: pada 2024 pesawat tempur terdiri dari 4 jenis (F-16 A/B dan C/D, Sukhoi 27 dan 30, Hawk 200, Super Tucano) dari 4 negara (AS, Rusia, Inggris, Brasil). Kini bisa jadi 10 jenis (ditambah Rafale, KF-21, KAAAN, M346FA, J-10 dan MiG) dari 7 negara (ditambah Prancis, Korea Selatan, Turkiye, Italia). Ini menyulitkan integrasi dan interoperabilitas, serta membuat perawatan makin rumit dan mahal. Pemerintah juga memberi sinyal yang ambigu dan tidak strategis ke negara mitra: alih-alih otonom sesuai politik luar negeri bebas aktif, Indonesia ingin membeli alutsista dari negara-negara yang posisi geopolitiknya	



Apa yang Menjadi Masalah?	Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?	Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?	Solusi yang Seharusnya Dilakukan
		saling bertentangan (AS, Tiongkok, Rusia). 5 Penghapusan komando teritorial (koter) adalah agenda Reformasi Sektor Keamanan yang belum tuntas sejak Reformasi. Struktur TNI tidak seharusnya meniru struktur pemerintahan (berbeda dengan Polri). Koter juga dinilai usang, mahal, dan pernah membuka jalan dwifungsi di masa Orde Baru. Penambahan Kodam tidak mendesak, membuka jalan remilitarisasi, bahkan berisiko mengambil alih lahan masyarakat. Rekrutmen anggota baru juga menambah belanja pegawai yang selama ini sudah mendominasi anggaran pertahanan, sehingga porsi untuk modernisasi makin kecil.	
Menteri Luar Negeri Menteri Kabinet Bayangan Shofwan Al-Banna Choiruzzad Menteri Kabinet Merah Putih Sugiono Nilai 6/10	1 Kerentanan geopolitik meningkat akibat persaingan negara-negara besar. 2 Dunia memasuki era ketidakpastian: ketegangan geopolitik, melemahnya tatanan dan institusi multilateral, fragmentasi ekonomi, serta krisis energi dan iklim. 3 Persatuan dan sentralitas ASEAN terancam. 4 Ketergantungan pada negara besar	1 Mendekat ke semua kekuatan besar tanpa perencanaan koheren, sehingga menjadi “appeasement” yang saling bertentangan: ke Tiongkok (joint development di wilayah tumpang tindih klaim, Passing Exercise di wilayah sensitif) dan ke AS (konsesi anti-Tiongkok dalam perjanjian ART, rencana Blanket Overflight, Kertajati sebagai pusat MRO Hercules C-130 AS, bergabung dengan Board of Peace).	1 Indonesia terlihat tidak berprinsip sehingga tidak dipercaya, dan negara besar terdorong menekan karena Indonesia mudah memberi konsesi demi konsesi. Konsesi seperti <i>overlapping claims</i>, <i>blanket overflight</i>, dan BoP juga berisiko melanggar kepentingan nasional dan UUD NRI 1945. 2 Banyak kunjungan tanpa agenda yang koheren membuat kesepakatan dan pernyataan sulit 1 Menjalankan bebas aktif secara terencana, koheren, dan sesuai undang-undang serta kepentingan nasional, agar Indonesia tidak menjadi “tidak bebas” dan “pasif” meski sibuk berkunjung. Rencana <i>Blanket Overflight</i> perlu dibuka ke publik dan dibatalkan bila masih berlanjut. 2 Memaksimalkan modal yang sudah ada, terutama ASEAN dan solidaritas negara berkembang,

Apa yang Menjadi Masalah?	Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?	Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?	Solusi yang Seharusnya Dilakukan
makin tinggi. 5 Genosida dan pembersihan etnis terhadap Palestina mengancam cita-cita nasional “mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. 6 Situasi dunia yang makin tidak pasti membutuhkan tata kelola kebijakan luar negeri yang baik.	2 Hadir di banyak forum negara besar (“if you are not on the table, you are on the menu”), tetapi tanpa agenda yang koheren, sangat personalistik, dan kurang didukung kelembagaan. 3 Belum punya visi yang jelas untuk ASEAN, sementara asap karhutla yang menyebar ke negara tetangga menggerus kredibilitas Indonesia. 4 Bergantung pada modal Tiongkok untuk hilirisasi nikel dan infrastruktur, serta pada Huawei dan ZTE untuk jaringan BTS dan 4G/5G; di sisi lain bergantung pada AS untuk pertahanan, transaksi berbasis dolar, dan teknologi digital non-hardware. 5 Mengecam kejahatan entitas zionis, tetapi bergabung dengan <i>Board of Peace</i> (BoP) dan <i>International Stabilization Force</i> (ISF), bahkan sempat berencana menampung ribuan warga Gaza atas saran Steve Witkoff. 6 Memusatkan kebijakan luar negeri di istana dan kurang melibatkan Kemenlu.	dijalankan, sehingga kredibilitas Indonesia turun. 3 Tanpa visi Indonesia, ASEAN berisiko kehilangan persatuan dan sentralitas, sehingga kawasan kehilangan alat meredam ketegangan dan bisa terseret konflik AS–Tiongkok. Melemahnya ketahanan kawasan ikut melemahkan ketahanan nasional. 4 Muncul ketergantungan struktural ganda pada Tiongkok dan AS; upaya diversifikasi sudah ada, tetapi belum optimal. 5 Indonesia berisiko terlibat dalam genosida dan pembersihan etnis, yang berarti melanggar konstitusi. BoP terbukti menekan sesuai agenda Israel, seperti menghapus nama Palestina dari buku ajar dan mengutamakan demiliterisasi Gaza ketimbang perlindungan warga sipil. 6 Kebijakan yang personalistik dan tidak koheren menurunkan kredibilitas, dan koordinasi berantakan hingga hal kecil seperti terlambatnya kredensial diplomatik bagi duta besar asing.	dengan dukungan kelembagaan yang optimal. 3 Menyusun visi ASEAN yang jelas dan mengambil peran kepemimpinan di ASEAN. 4 Memperkuat kapasitas domestik dan diversifikasi secara terukur dan terencana. 5 Meninjau dan membatalkan keanggotaan di BoP serta rencana pengiriman tentara untuk ISF, yang cenderung selaras dengan agenda Israel, lalu meningkatkan tekanan internasional, termasuk mengadili lewat hukum domestik pelaku penghancuran rumah sakit Indonesia di Gaza. 6 Presiden perlu membenahi tata kelola kebijakan luar negeri, karena <i>foreign policy begins at home</i>.



	Apa yang Menjadi Masalah?	Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?	Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?	Solusi yang Seharusnya Dilakukan
Menteri Pertanian & Kedaualatan Pangan Menteri Kabinet Bayangan  Isnawati Hidayah Menteri Kabinet Merah Putih  Zulkifli Hasan Nilai 2/10 (Menko Pangan)  Andi Amran Sulaiman Nilai 3/10 (Menteri Pertanian; juga Kepala Badan Pangan Nasional)  Sakti Wahyu Trenggono Nilai 3/10 (Menteri Kelautan dan Perikanan)  Sudaryono Nilai 2/10 (Kepala Badan Gizi Nasional, sejak 22 Jul 2026; menggantikan Nanik S. Deyang)	1 Kebijakan pangan terlalu <i>top-down</i>, seragam, dan minim uji coba berbasis bukti, padahal kondisi petani, nelayan, komoditas, pasar, dan persoalan gizi berbeda antarwilayah. 2 Kebijakan pertanian seragam (<i>one-size-fits-all</i>), subsidi pupuk berbelit, dan petani kecil kurang diperkuat. 3 Program nelayan mengejar pembangunan fisik, bukan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. 4 Program gizi mengejar jumlah porsi, bukan hasil gizi. 5 Koperasi Desa Merah Putih membangun gerai baru, tetapi tidak menjawab masalah rantai pasok, pemasaran, dan posisi tawar produsen desa.	1 Meluncurkan program berskala besar (MBG, Kopdes Merah Putih, <i>food estate</i>, Kampung Nelayan Merah Putih) dengan target nasional dan pembangunan fisik masif, sebelum kebutuhan lokal, kesiapan kelembagaan, dan efektivitas modelnya teruji. 2 Mengandalkan proyek pangan skala besar yang belum terbukti seperti <i>food estate</i>, menyalurkan subsidi pupuk lewat rantai birokrasi distribusi yang panjang, dan menjadikan penyuluh sekadar pelaksana program pusat. 3 Membangun Kampung Nelayan Merah Putih dengan paket infrastruktur dari pusat, tanpa melibatkan koperasi atau kelompok nelayan dalam menentukan kebutuhannya. 4 Menjalankan MBG secara nasional dengan ukuran keberhasilan jumlah porsi, tanpa piloting dan evaluasi independen. 5 Membangun gerai Kopdes Merah Putih secara masif, dengan risiko pembiayaan dibebankan pada Dana Desa.	1 Instrumen ditentukan sebelum masalahnya dipastikan. Satu model nasional untuk semua wilayah berisiko membangun infrastruktur yang tidak dibutuhkan, melahirkan lembaga baru yang tumpang tindih, dan menghabiskan anggaran untuk program yang manfaatnya belum teruji. 2 Dana proyek baru berskala masif tidak tersedia untuk memperkuat yang sudah bekerja, seperti penyuluhan dan infrastruktur produksi. Tanpa evaluasi berbasis hasil, tidak jelas apakah pendapatan, produktivitas, dan posisi tawar petani benar-benar naik. 3 Desa nelayan berisiko menerima infrastruktur yang tidak mereka perlukan, sementara kebutuhan nyata seperti rantai dingin, akses pasar, BBM, dan pembiayaan tidak terjawab. 4 Anggaran besar MBG tidak tersedia untuk memperkuat layanan gizi yang sudah bekerja, seperti Posyandu dan Puskesmas, padahal pencegahan stunting perlu diprioritaskan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan. 5 Kopdes menjadi lembaga baru yang tumpang tindih	1 Mengaudit MBG, <i>food estate</i>, dan Kopdes berdasarkan manfaat, biaya, dan dampak lokal; menyusun kebijakan dari pemetaan kebutuhan kabupaten/desa; dan mewajibkan piloting, evaluasi independen, serta partisipasi masyarakat sebelum program diperluas. 2 Menyalurkan subsidi pupuk langsung (<i>tunai/cashless</i>), menyesuaikan kebijakan dengan agroekologi tiap daerah, dan mengalihkan investasi dari proyek pangan skala besar ke petani kecil: irigasi, penyuluhan, benih lokal, pascapanen, dan akses pasar. 3 Menggeser fokus Kampung Nelayan Merah Putih ke pendapatan nelayan (rantai dingin, akses pasar, BBM, pembiayaan, dan pengolahan hasil tangkapan), dengan investasi yang ditentukan bersama koperasi/kelompok nelayan. 4 Mengukur MBG dari hasil gizi, bukan jumlah porsi; untuk pencegahan stunting, memprioritaskan 1.000 HPK (ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah dua tahun) lewat Posyandu, Puskesmas, dan program gizi yang sudah ada.

Apa yang Menjadi Masalah?	Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?	Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?	Solusi yang Seharusnya Dilakukan
		dengan kelembagaan desa, risiko pembiayaannya ditanggung Dana Desa, dan dananya tidak tersedia untuk memperkuat rantai pasok lokal yang sudah ada.	5 Meninjau ulang atau menghentikan Kopdes, berhenti membebaskan risikonya ke Dana Desa, menjadikan bangunan yang ada aset publik produktif, dan memperpendek rantai pasok produsen-konsumen agar petani dan nelayan mendapat harga layak.

4.1. Pusat Pemerintahan: Masalah Konstitusional dan Manajerial

Kelemahan di hampir semua sektor bermula dari pusat pemerintahan. Di tingkat konstitusi, Feri Amsari menunjuk sumbernya di puncak kekuasaan: kebijakan dan tindakan Presiden tidak berpijak pada UUD 1945, undang-undang, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik³. Kementerian Sekretariat Negara semestinya memastikan penyelenggaraan negara berjalan tertib dan sesuai hukum⁴, tetapi fungsi itu lumpuh ketika pelanggarnya adalah Presiden sendiri, sebab tidak ada mekanisme di dalam istana yang mampu mengoreksi atasan tertinggi. Akibatnya, undang-undang lahir tanpa naskah akademik yang diwajibkan hukum, peraturan disusun tertutup, kewenangan antarlembaga tumpang tindih, dan keputusan besar diambil tiba-tiba di luar program pembangunan nasional.

▲ Masalah Sekretariat Negara berada di tingkat konstitusi: tanpa disiplin hukum di puncak kekuasaan, pembenahan administrasi istana tidak akan mengubah apa pun.

Di tingkat pengelolaan kabinet, masalah yang sama paling kasatmata pada reshuffle: tujuh kali dalam dua tahun, termasuk tiga Menteri Keuangan dalam kurang dari dua tahun. Pergantian datang mendadak, tanpa evaluasi kinerja terbuka maupun penjelasan resmi, seperti pencopotan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 14 September 2026 di tengah tekanan terhadap rupiah. Kesenambungan kebijakan terputus, kepercayaan pasar turun, dan menteri terdorong menyenangkan Presiden ketimbang mengejar target. Bagi Ahmad Jilul Qur'ani Farid, reshuffle hanyalah puncak gunung es. Di bawah permukaan, Sekretariat Kabinet kehilangan perannya sebagai dapur kebijakan sejak ditempatkan di bawah Kemensetneg melalui Perpres 148/2024, sehingga MBG, Kopdes, dan Sekolah Rakyat lahir tanpa analisis lintas sektor dan saling bertabrakan. Jabatan Sekretaris Kabinet

³ Asas-asas umum pemerintahan yang baik dirumuskan dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

⁴ Pasal 43 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah, mewajibkan rancangan undang-undang disertai naskah akademik, dengan pengecualian terbatas.



diisi perwira TNI aktif⁵ yang lebih sering tampil sebagai juru bicara, sehingga pekerjaan intinya, yaitu mengelola sidang kabinet, mencatat keputusan, dan memantau tindak lanjutnya, tergeser. Program yang cacat sejak dirancang akan terus bermasalah siapa pun menteri, dan tanpa catatan keputusan yang dapat diaudit, reshuffle tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai keputusan berbasis kinerja.

▲ **Reshuffle yang berulang adalah gejala dari kabinet yang dikelola tanpa dapur kebijakan, tanpa ukuran kinerja, dan tanpa catatan keputusan yang dapat diaudit; selama itu tidak dibenahi, pergantian menteri hanya mengganti orang.**

4.2. Sektor-Sektor: Kendali Menguat, Layanan Melemah

Di bidang ekonomi, negara mengambil alih peran pasar tanpa memikul akuntabilitasnya. Media Wahyudi Askar mencatat bahwa melalui Danantara dan PT Danantara Sumberdaya Indonesia, pemerintah kini mengelola aset, dividen, hingga ekspor batu bara, sawit, dan ferroalloy. APBN kehilangan dividen ketika utang pemerintah mencapai Rp10.293 triliun, dan risiko utang Whoosh kembali ke Kementerian Keuangan. Bhima Yudhistira Adhinegara melihat ujung rantai itu di APBN⁶. Bunga utang menyedot 24% penerimaan pajak, anggaran digeser di tengah tahun untuk MBG dan Kopdes tanpa persetujuan DPR, penempatan dana SAL Rp400 triliun dan insentif hilirisasi ditambah tanpa evaluasi meski insentif Rp130 triliun minim menciptakan lapangan kerja, sedangkan PPh UMKM justru dinaikkan.

▲ **Quasi fiskal memanfaatkan anggaran diluar ketentuan demi memuluskan program prioritas, menyebabkan rentetan risiko menular dari APBN ke perbankan dan ujungnya merugikan pembayar pajak.**

Pola kendali pusat yang menggantikan pemecahan masalah juga terlihat di daerah, desa, dan lahan. Armand Suparman mencatat bahwa beban pegawai daerah dijawab dengan resentralisasi fiskal, ruang gerak pemda dipersempit lewat earmarking dan belanja wajib hingga APBD menjadi “anggaran instruksi”, dan korupsi kepala daerah dijawab dengan pilkada lewat DPRD, yang hanya memindahkan biaya politik ke transaksi elite. Isnawati Hidayah menemukan kesalahan urutan yang serupa di sektor pangan: program dimulai dari target nasional, lalu mencari masalahnya belakangan. MBG berjalan tanpa uji coba dan evaluasi independen ketika Posyandu dan Puskesmas tidak diperkuat, dan gerai Koperasi Desa Merah Putih dibangun masif tanpa menjawab rantai pasok dan posisi tawar produsen desa. Di sektor lingkungan, Iqbal Damanik mencatat target besar yang tidak diikuti perubahan arah: RUPTL tetap bertumpu pada energi fosil, mandatori B50 berisiko membuka lebih dari enam juta hektare kebun sawit, ditambah bioethanol dan proyek strategis nasional di atas tanah adat dikawal militer.

⁵ Pasal 47 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2025 membatasi jabatan sipil yang dapat diisi prajurit aktif. Di luar daftar itu, prajurit harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif.

⁶ Nilai keuangan diberikan kepada Suhasil Nazara, yang menjabat sejak 14 September 2026, meski sebagian besar kebijakan yang dikritik diambil pada masa Purbaya Yudhi Sadewa. Pergeseran anggaran tanpa persetujuan DPR dinilai bertentangan dengan Putusan MK No. 100/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 16 September 2026.



▲ **Petani, dan masyarakat adat menanggung beban program yang dirancang di pusat tanpa kajian dan tanpa partisipasi.**

Di layanan dasar, program baru menggerus layanan yang sudah berjalan. Iman Zanatul Haeri mencatat anggaran pendidikan dipakai untuk MBG dan sekolah-sekolah khusus ketika dana BOS masih di bawah standar dan guru swasta bekerja tanpa upah minimum. Khoirunnisa Nur Agustyati menunjukkan anggaran KemenPPA dipangkas 48,86% dan layanan korban kekerasan dialihkan hanya lewat call center, justru ketika perempuan pembela HAM belum terlindungi. Nabiyla Risfa Izzati menelusuri akarnya ke cara kabinet bekerja: prioritas ditentukan keinginan sepihak Presiden, para menteri lebih banyak mengiyakan daripada menimbang, dan data yang tumpang tindih dibiarkan sampai polemik desil mengancam hak warga atas bansos. Di bidang kesehatan, Irma Hidayana mencatat kritik tenaga kesehatan dan guru besar dijawab dengan pencopotan, sedangkan UU No. 17/2023 menghapus anggaran minimal kesehatan dan membatasi kolegium tepat ketika fakultas kedokteran ditambah secara cepat.

▲ **Anggaran dan perhatian berpindah ke program yang mudah dipamerkan, dan koreksi dari dalam dibungkam ketika layanan dasar paling membutuhkannya.**

Di bidang hukum, keamanan, ruang digital, dan hubungan luar negeri, kewenangan aparat diperluas ketika pengawasannya melemah. Yance Arizona mencatat Kejaksaan dijadikan lembaga utama pemberantasan korupsi dan dipakai menyasar oposisi, KPK dilemahkan, dan konflik agraria dihadapi dengan Satgas PKH yang militeristik. Curie Maharani menemukan anggaran pertahanan naik menjadi Rp335,3 triliun tanpa transparansi pengadaan, sementara TNI dikerahkan ke program pangan, energi, dan air. Nilai terendah dalam seluruh rapor, 1, jatuh pada Menko Polkam dan Kapolri, sejalan dengan catatan di sektor lain tentang aparat yang dipakai mengamankan investasi dan ruang sipil yang menyempit. Nenden Sekar Arum melihat logika yang sama di ruang digital: warga diwajibkan registrasi biometrik dan verifikasi usia lewat KTP atau pindai wajah, sedangkan bandar judi online dan jaringan pembayarannya luput dari tindakan. Di luar negeri, Shofwan Al-Banna Choiruzzad mencatat diplomasi personalistik yang berubah menjadi rangkaian konsesi kepada Tiongkok dan Amerika Serikat, termasuk keanggotaan di Board of Peace (BoP) yang berisiko bertentangan dengan amanat konstitusi soal Palestina.

▲ **Negara memperkuat aparat dan pengawasan atas warganya, sembari melemahkan pengawasan atas dirinya sendiri.**



4.3. Benang Merah dan Evaluasi Utama

Kelima belas catatan memperlihatkan lima pola yang berulang: keputusan mendahului kajian, program baru menggerus layanan, kewenangan dan anggaran dipusatkan, risiko dialihkan ke publik, dan pendekatan keamanan yang mempersempit ruang kritik. Kelimanya bekerja sebagai satu rantai. Kewenangan yang terpusat memudahkan keputusan diambil tanpa kajian. Keputusan tanpa kajian melahirkan program baru yang menyedot anggaran layanan lama. Ketika hasilnya buruk, risikonya dialihkan ke APBN, Dana Desa, atau warga, dan kritik dijawab dengan pendekatan keamanan. Rantai itu bermula di pusat pemerintahan, dan kegagalannya dijawab dengan mengganti menteri. Rantai yang sama menjelaskan mengapa banyak janji berbalik arah, dari energi terbarukan dan kemandirian pertahanan hingga perlindungan data pribadi dan hapus tagih kredit UMKM: instrumennya keliru sejak dipilih.



5

Penilaian Capaian Program Kerja Kabinet Merah Putih Berbasis Sektor

Selama dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, ratusan triliun rupiah telah dialokasikan untuk berbagai program prioritas berskala besar, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Di tengah besarnya anggaran dan cepatnya ekspansi program, ruang bagi publik untuk menilai hasilnya masih terbatas karena informasi mengenai monitoring, evaluasi, dan dampak kebijakan belum tersedia secara terbuka dan memadai. Padahal, keberhasilan program tidak semestinya diukur dari besarnya anggaran atau jumlah penerima semata, tetapi dari manfaat dan perubahan nyata yang dihasilkan. Dalam keterbatasan evaluasi publik tersebut, studi ini menangkap persepsi masyarakat umum dan para ahli untuk melihat bagaimana mereka menilai pelaksanaan, manfaat, dan capaian program-program prioritas pemerintah.

5.1. Implementasi Program Prioritas

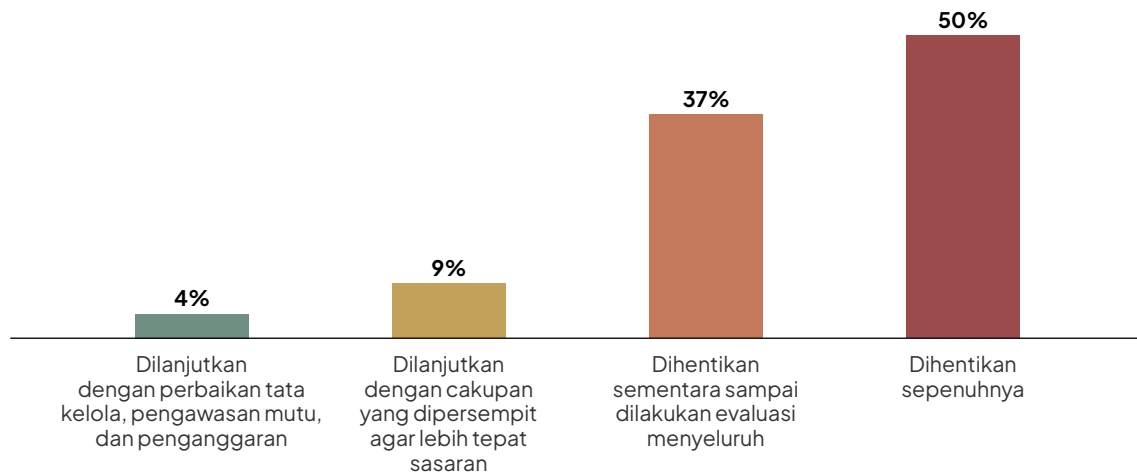
5.1.1. Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program andalan Presiden Prabowo, juga mendapat penolakan dari mayoritas responden. Sebanyak 87% responden menginginkan program tersebut dihentikan, sementara hanya 13% yang ingin program tetap dilanjutkan (Gambar 5). Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menghendaki penghentian program MBG. Karena selain tidak tepat sasaran, program MBG justru menjadi bancakan elite politik dan menggerus anggaran pendidikan.



Gambar 5

Penilaian Ahli Terhadap Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis



Sumber:

Survei Ahli, N = 129, diolah oleh peneliti.

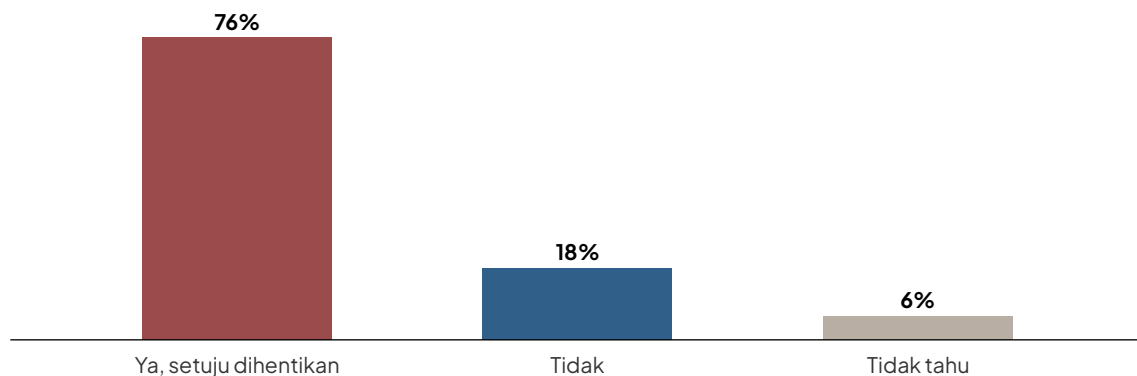
Responden ditanyakan, "Manakah pernyataan berikut yang paling mendekati pandangan Anda mengenai kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG)?"

Opsi jawaban meliputi "Dilanjutkan dengan perbaikan tata kelola, pengawasan mutu, dan penganggaran", "Dilanjutkan dengan cakupan yang dipersempit agar lebih tepat sasaran", "Dihentikan sementara sampai dilakukan evaluasi menyeluruh", dan "Dihentikan sepenuhnya".

Mayoritas responden (76%) setuju program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan, sedangkan 18% tidak setuju dan 6% menyatakan tidak tahu. Artinya sekitar 3 dari 4 responden menghendaki program ini dihentikan (Gambar 6). Terdapat korelasi yang kuat antara ahli dan masyarakat umum dalam menilai program MBG. Artinya baik ahli maupun masyarakat secara luas memandang bahwa program MBG tidak memberikan dampak positif kepada masyarakat, sehingga harus segera dihentikan.

Gambar 6

Penilaian Masyarakat Terhadap Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis



Sumber:

Survei Masyarakat Umum, N = 1.142, diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan, "Apakah Anda setuju MBG dihentikan?"

Opsi jawaban meliputi "Ya, setuju dihentikan", "Tidak", dan "Tidak tahu".

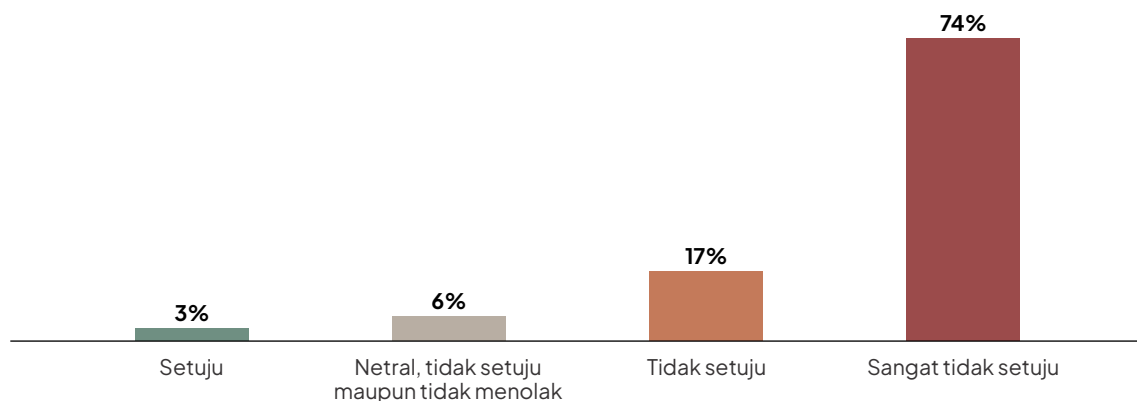
Serupa dengan program MBG, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga mendapat penilaian negatif dari mayoritas responden. Dari sisi ahli, sebanyak 91% responden menilai tidak setuju bahwa rancangan dan implementasi program KDMP sudah memadai untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Gambar 7). Sementara 6% ahli bersikap netral dan hanya 3% ahli yang menilai setuju.

Masyarakat umum juga memiliki penilaian yang sama dengan ahli. Sebanyak 66% responden menyatakan tidak setuju terhadap program KDMP. Hanya 21% yang menyatakan setuju, sementara 13% lainnya tidak tahu (Gambar 8). Penilaian ini menggambarkan rendahnya keyakinan masyarakat terhadap perencanaan dan pelaksanaan program tersebut.

5.1.2. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Gambar 7

Persepsi Ahli Terhadap Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih



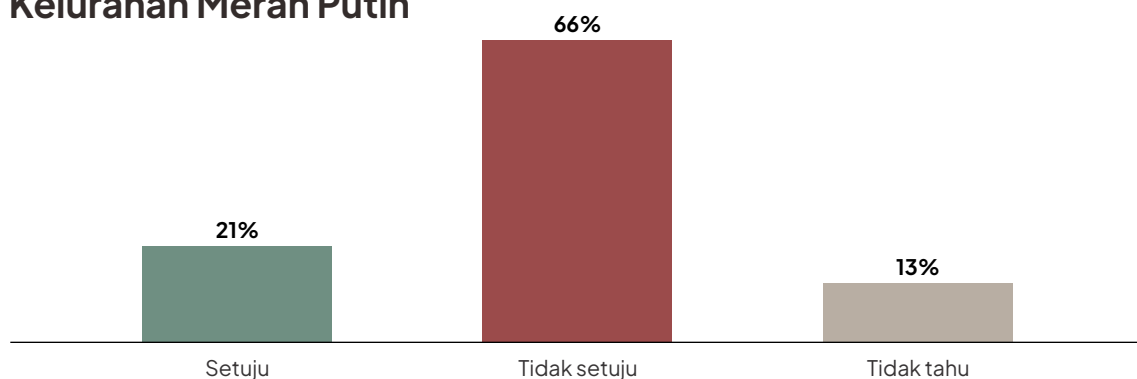
Sumber:

Survei Ahli, N = 129, diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan, "Sejauh mana Anda menyetujui bahwa Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang dan dijalankan secara memadai untuk mencapai tujuannya?"
Opsijawaban meliputi "Setuju", "Tidak setuju", "Sangat tidak setuju", dan "Netral, tidak setuju maupun tidak menolak".

Gambar 8

Persepsi Masyarakat Terhadap Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih



Sumber:

Survei Masyarakat Umum, N = 1.142, diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan, "Bagaimana pendapat Anda tentang program Kopdes Merah Putih?"
Opsijawaban meliputi "Setuju", "Tidak setuju", dan "Tidak tahu".

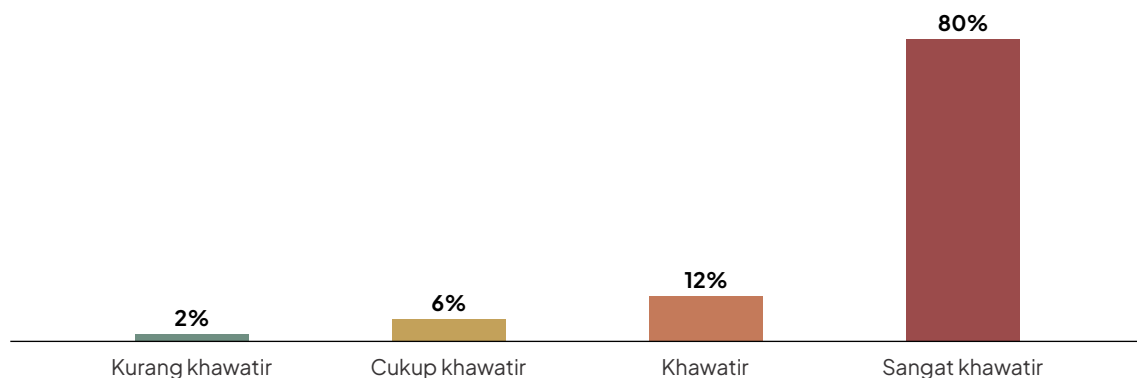
▲ Baik MBG maupun KDMP, harus segera dihentikan karena desain dan pelaksanaannya sangat tidak layak. Sudah saatnya pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat.

5.2. Penilaian Terhadap Kebijakan Pemerintah

Kekhawatiran terhadap arah kebijakan pemerintah juga sangat tinggi di kalangan ahli. Sebanyak 80% ahli menyatakan sangat khawatir dan 12% menyatakan khawatir, sehingga total 92% ahli mengungkapkan kekhawatiran terhadap arah kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah (Gambar 9). Hanya 2% yang menyatakan kurang khawatir. Angka ini menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap arah kebijakan pemerintah bukan sekadar pandangan sebagian kecil ahli, melainkan penilaian mayoritas. Sehingga memperkuat urgensi evaluasi dan koreksi kebijakan agar arah pemerintahan lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan jangka panjang.

Gambar 9

Persepsi Ahli terhadap Arah Kebijakan Pemerintah



Sumber:

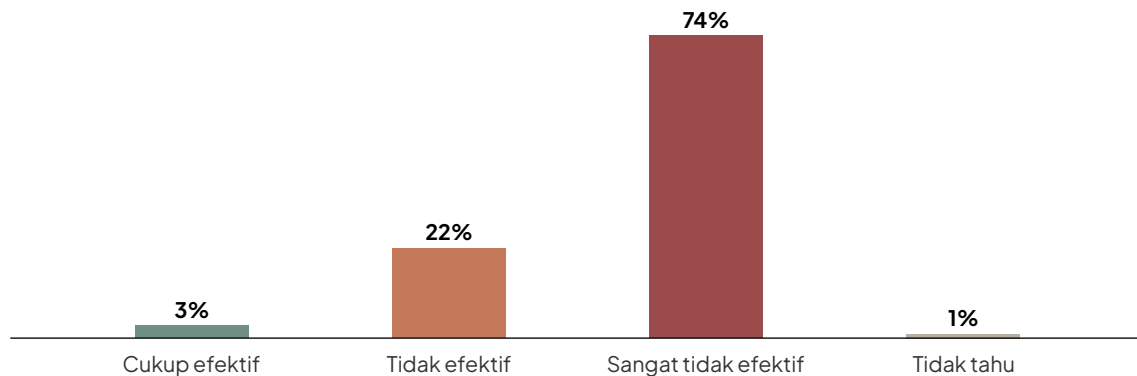
Survei Ahli, N = 129, diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan, "Seberapa khawatir Anda terhadap arah kebijakan pemerintah?"
Opsijawaban meliputi "Kurang khawatir", "Cukup khawatir", "Khawatir", dan "Sangat khawatir".

Sebagai contoh, sebanyak 96% ahli menyatakan pemerintah tidak efektif dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sedang terjadi. Terdiri dari 74% ahli yang menyatakan pemerintah "sangat tidak efektif" dan 22% ahli menyatakan "tidak efektif" (Gambar 10). Seharusnya ini dianggap sebagai sinyal bahwa karhutla bukan sekedar bencana musiman, melainkan cerminan kegagalan struktural dalam tata kelola hutan dan lahan.

Gambar 10

Persepsi Ahli terhadap Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan



Sumber:

Survei Ahli, N = 129, diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan, "Bagaimana Anda menilai efektivitas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh pemerintah selama dua tahun terakhir?"
Opsional jawaban meliputi "Cukup efektif", "Tidak efektif", "Sangat tidak efektif", dan "Tidak tahu".

▲ Sangat jelas karhutla terjadi karena erat kaitannya dengan kepentingan korporasi pemegang konsesi dan penikmat keuntungan dari bisnis ekstraktif yang mengeksploitasi hutan dan lahan.

Pemerintah harus segera melakukan perbaikan tata kelola hutan dan lahan secara holistik. Cabut izin bermasalah, keterbukaan informasi konsesi harus dibuka kepada publik, tindak tegas secara hukum dan bebaskan biaya pemulihan ekologis kepada aktor-aktor yang terlibat.

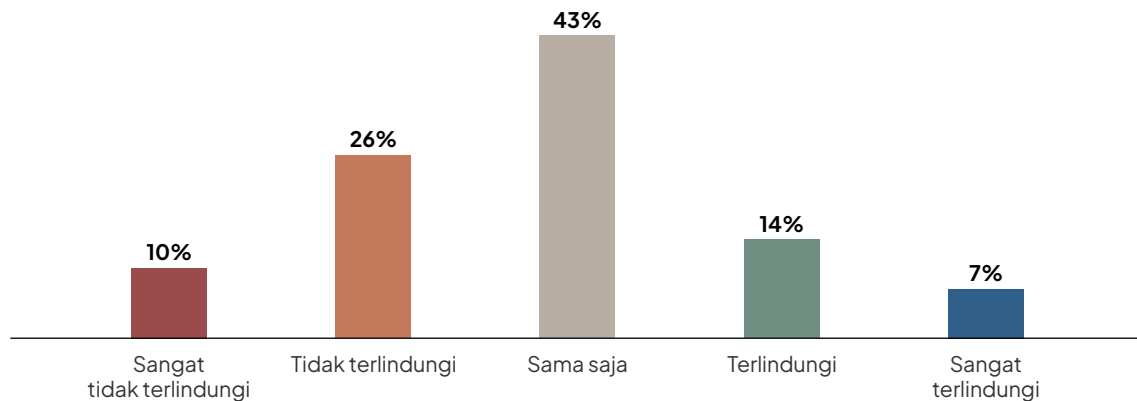
5.3. Tata Kelola Pemerintahan

▲ Penilaian masyarakat terhadap perlindungan kebebasan sipil di era pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan.

Sebanyak 36% responden menilai kebebasan sipil tidak terlindungi atau sangat tidak terlindungi (Gambar 11). Sebaliknya, hanya 21% yang menilai kebebasan sipil terlindungi atau sangat terlindungi, sementara 43% menilai tidak ada perubahan. Proporsi responden yang menilai perlindungan kebebasan sipil secara negatif jauh lebih besar dibandingkan mereka yang menilai positif. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan kebebasan sipil masih menjadi persoalan penting dalam evaluasi masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran.

Gambar 11

Penilaian Perlindungan Kebebasan Sipil dalam Dua Tahun Terakhir



Sumber:

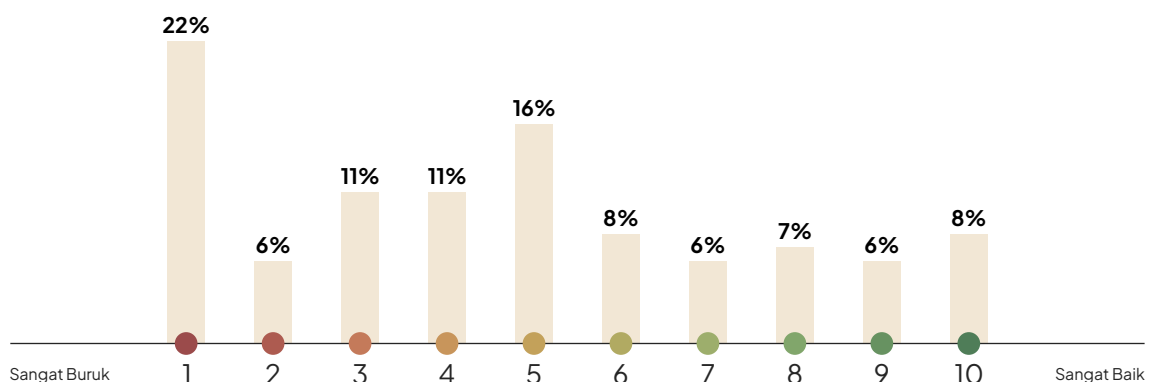
Survei Masyarakat Umum, N = 1.142, diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan, "Bagaimana penilaian Anda atas perlindungan kebebasan sipil (pers, berpendapat, berkumpul, berserikat) dalam 2 tahun terakhir?"
Opsijawaban meliputi "Sangat tidak terlindungi", "Tidak terlindungi", "sama saja", "terlindungi", dan "Sangat terlindungi".

Tingkat kepercayaan responden terhadap lembaga penegak hukum (POLRI, TNI, Kejaksaan, Kehakiman, KPK, dan KPPU) berada pada nilai rata-rata 4,7 dari 10 (Gambar 12). Nilai 1 menjadi pilihan terbanyak (22%). Sebanyak 50% responden memberi nilai rendah (1-4), 24% menilai cukup (5-6), dan 27% menilai tinggi (7-10). Hampir 2 kali lipat masyarakat yang sudah tidak percaya terhadap lembaga penegak hukum dibandingkan masyarakat yang masih percaya. Kondisi ini tercermin dari semakin banyaknya regulasi yang justru memperkuat supremasi aparat penegak hukum terhadap masyarakat sipil.

Gambar 12

Tingkat Kepercayaan Pada Lembaga Penegak Hukum (skala 1-10)



Sumber:

Survei Masyarakat Umum, N = 1.142, diolah oleh peneliti.

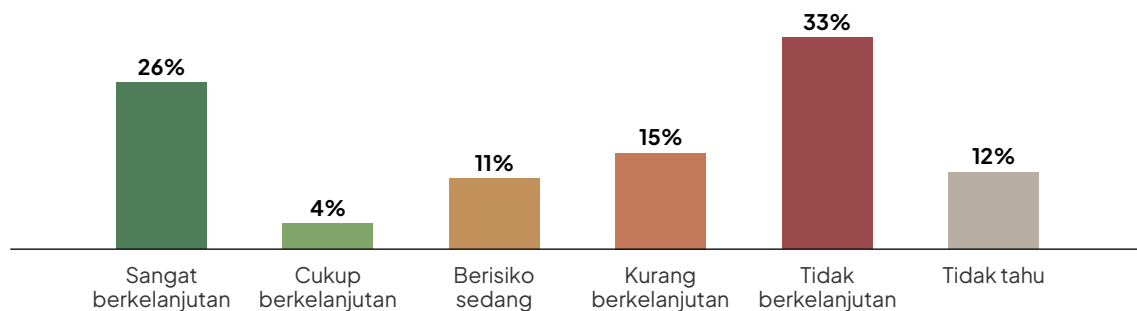
Responden ditanyakan, "Bagaimana tingkat kepercayaan Anda terhadap lembaga penegak hukum (POLRI, TNI, Kejaksaan, Kehakiman, KPK, dan KPPU) di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran?"
Opsijawaban scoring 1-10.

▲ Kebijakan utang pemerintah berisiko membebani generasi mendatang.

Sebanyak 33% ahli menilai utang pemerintah tidak berkelanjutan, 15% menilai kurang berkelanjutan, dan 11% menilai memiliki risiko sedang (Gambar 13). Artinya, 59% ahli melihat adanya risiko dalam keberlanjutan utang pemerintah. Sebaliknya, hanya 30% ahli yang menilai kebijakan utang cukup atau sangat berkelanjutan.

Gambar 13

Persepsi Ahli terhadap Keberlanjutan Kebijakan Utang Pemerintah



Sumber:

Survei Ahli, N = 129, diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan, "Bagaimana keberlanjutan kebijakan utang bagi generasi mendatang?"

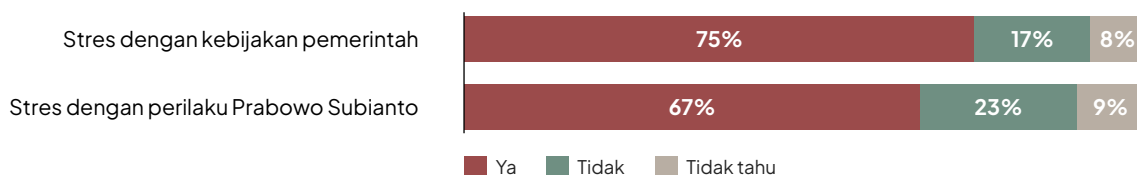
Opsijawaban meliputi "Sangat berkelanjutan", "Cukup berkelanjutan", "Kurang berkelanjutan", "Berisiko sedang", "Tidak berkelanjutan", dan "Tidak tahu".

▲ Dampak pemerintahan tidak hanya tercermin dari penilaian terhadap kebijakan, tetapi juga dari tekanan psikologis yang dirasakan responden. Sebanyak 75% responden mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah (Gambar 14).

Sementara itu, 67% responden mengaku mengalami stres akibat perilaku Presiden Prabowo Subianto. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan pemerintah dan perilaku Presiden telah memberikan tekanan psikologis dalam kehidupan sehari-hari mayoritas masyarakat.

Gambar 14

Perasaan Stres terhadap Kebijakan Pemerintah dan Perilaku Presiden



Sumber:

Survei Masyarakat Umum, N = 1.142, diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan, "Apakah Anda merasa stres dengan kebijakan Pemerintah?", "Apakah Anda merasa stres dengan perilaku Prabowo Subianto?"

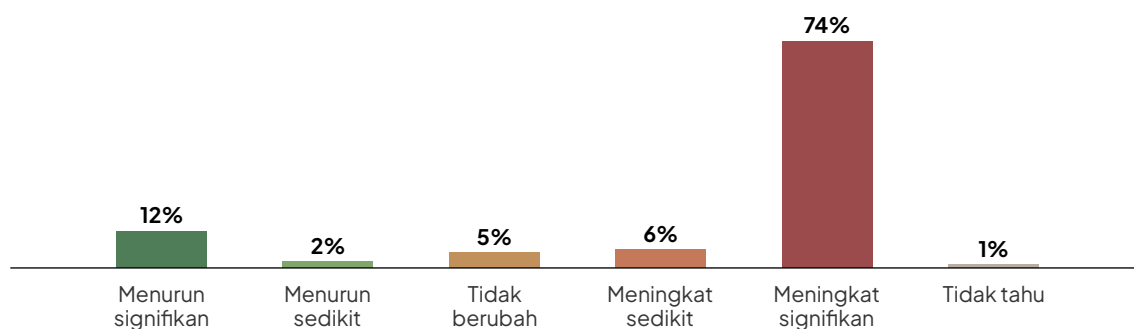
Opsijawaban meliputi "Ya", "Tidak", dan "Tidak tahu".

▲ Sebanyak 80% ahli menilai keterlibatan aktor dan pendekatan militer dalam urusan sipil mengalami peningkatan (Gambar 15).

Dari jumlah tersebut, 74% menilai meningkat signifikan, sedangkan 6% menilai peningkatannya tidak signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas ahli melihat adanya perluasan peran militer ke ranah sipil di bawah pemerintahan Kabinet Merah Putih. Penilaian ini sejalan dengan sejumlah kebijakan yang memperluas keterlibatan militer dalam urusan di luar pertahanan, termasuk program Koperasi Desa Merah Putih dan pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP). Kedua kebijakan tersebut sudah cukup menjawab bahwa ada pergeseran signifikan antara batas fungsi pertahanan dan urusan sipil.

Gambar 15

Persepsi Ahli terhadap Keterlibatan Aktor dan Pendekatan Militer dalam Urusan Sipil



Sumber:

Survei Ahli, N = 129, diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan, "Bagaimana perubahan keterlibatan aktor dan pendekatan militer dalam urusan sipil?"

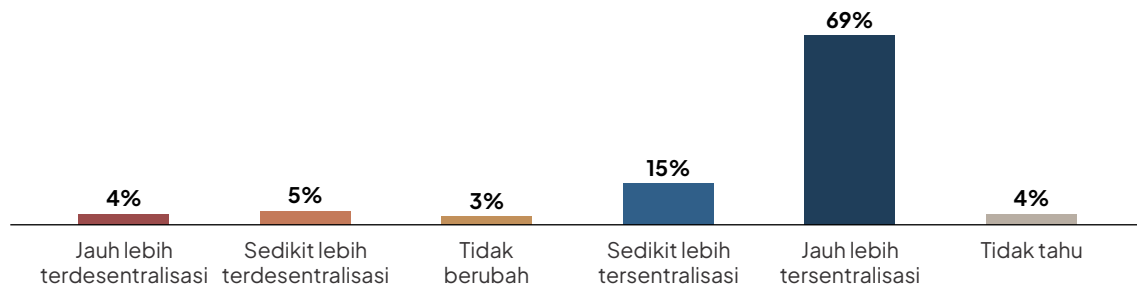
Opsi jawaban meliputi "Menurun signifikan", "Menurun sedikit", "Tidak berubah", "Meningkat sedikit", "Meningkat signifikan", dan "Tidak tahu".

▲ Para ahli juga menilai bahwa kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih semakin memusatkan kewenangan di pemerintah pusat.

Sebanyak 69% ahli menilai kewenangan menjadi jauh lebih tersentralisasi, sementara 15% menilai sedikit lebih tersentralisasi (Gambar 16). Sebaliknya, hanya 4% yang menilai kewenangan menjadi jauh lebih terdesentralisasi, 5% menilai sedikit lebih terdesentralisasi, dan 3% menilai tidak ada perubahan. Temuan ini memperlihatkan bahwa arah tata kelola pemerintahan semakin tersentralisasi.

Gambar 16

Persepsi Ahli terhadap Tingkat Pemusatan Kewenangan Pemerintah



Sumber:

Survei Ahli, N = 129, diolah oleh peneliti.

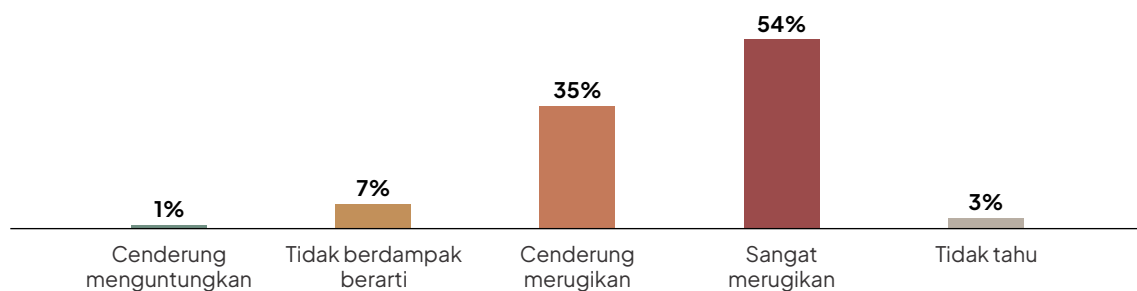
Responden ditanyakan, "Bagaimana perubahan tingkat pemusatan kewenangan pemerintah?"

Opsijawaban meliputi "Jauh lebih terdesentralisasi", "Sedikit lebih terdesentralisasi", "Tidak berubah", "Sedikit lebih tersentralisasi", "Jauh lebih tersentralisasi", dan "Tidak tahu".

Sebanyak 89% ahli menilai sentralisasi kewenangan berdampak negatif terhadap daerah, terdiri dari 54% yang menilai sangat merugikan dan 35% yang menilai cenderung merugikan (Gambar 17). Sebaliknya, hanya 1% yang menilai sentralisasi menguntungkan ekonomi daerah. Sementara itu, 7% menilai tidak ada dampak berarti dan 3% tidak tahu. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas ahli memandang sentralisasi sebagai persoalan serius karena berpotensi mempersempit ruang fiskal, melemahkan otonomi daerah, dan membatasi kemampuan daerah untuk menggerakkan ekonominya sendiri.

Gambar 17

Persepsi Ahli mengenai Dampak Pemusatan Kewenangan Pemerintah terhadap Ekonomi Daerah



Sumber:

Survei Ahli, N = 129, diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan, "Apa dampaknya terhadap ekonomi daerah?"

Opsijawaban meliputi "Cenderung menguntungkan", "Tidak berdampak berarti", "Cenderung merugikan", "Sangat merugikan", dan "Tidak tahu".

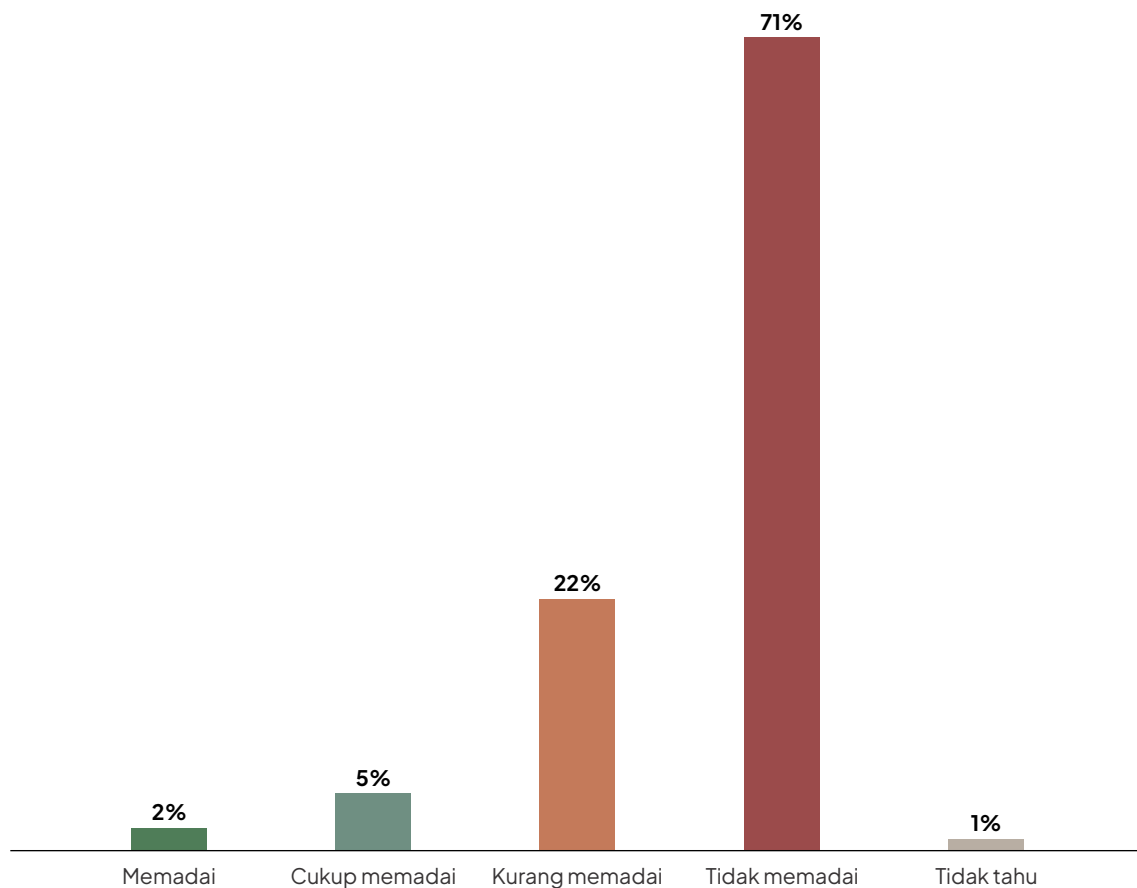
5.4. Kepemimpinan dan Komunikasi Publik

▲ Mayoritas ahli menilai kapasitas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam pengambilan keputusan belum memadai.

Sebanyak 71% ahli menilai kapasitasnya tidak memadai, sementara 22% menilai kurang memadai (Gambar 18). Dengan demikian, 93% ahli menilai kapasitas kepemimpinan Presiden belum memadai. Hanya 7% yang menilai cukup memadai atau memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas ahli meragukan kemampuan Presiden dalam mengambil keputusan strategis di tingkat pemerintahan.

Gambar 18

Persepsi Ahli terhadap Kapasitas Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto



Sumber:

Survei Ahli, N = 129, diolah oleh peneliti.

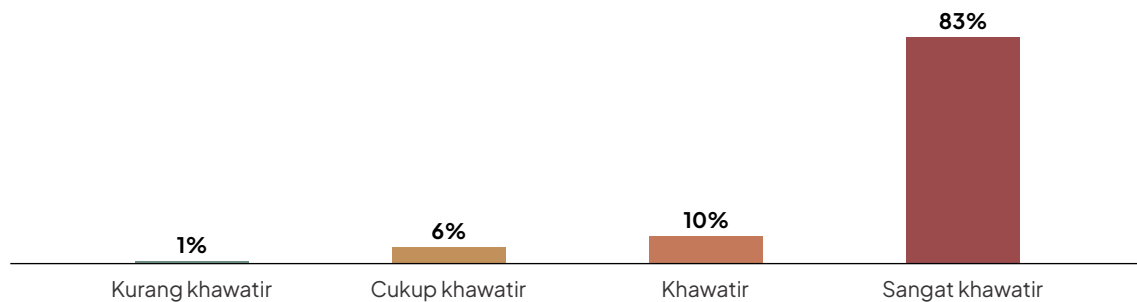
Responden ditanyakan, "Bagaimana Anda menilai kapasitas kepemimpinan yang ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto dalam pengambilan keputusan strategis selama dua tahun terakhir, sebagaimana teramati dari keputusan, kebijakan, dan tindakan publik beliau?" Opsi jawaban meliputi "Memadai", "Cukup memadai", "Kurang memadai", "Tidak memadai", dan "Tidak Tahu".

▲ Publik sangat mengkhawatirkan gaya kepemimpinan dan komunikasi publik Presiden.

Sebanyak 83% ahli menyatakan sangat khawatir dan 10% khawatir, sementara hanya 1% yang kurang khawatir (Gambar 19). Temuan ini menandakan bahwa cara Presiden memimpin dan berkomunikasi di ruang publik justru menjadi sumber kecemasan bagi masyarakat, sehingga memperburuk stabilitas kondisi sosial di masyarakat.

Gambar 19

Persepsi Ahli terhadap Gaya Kepemimpinan dan Komunikasi Publik Presiden



Sumber:

Survei Ahli, N = 129, diolah oleh peneliti.

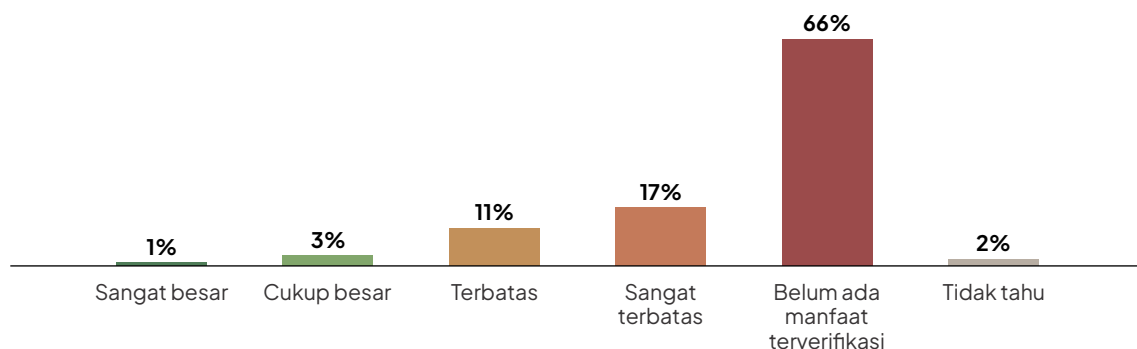
Responden ditanyakan, "Seberapa besar tingkat kekhawatiran Anda terhadap gaya kepemimpinan dan komunikasi publik Presiden Prabowo Subianto?"

Opsijawaban meliputi "Kurang khawatir", "Cukup khawatir", "Khawatir", dan "Sangat khawatir".

Diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden belum diikuti oleh manfaat yang dapat dibuktikan. Sebanyak 66% ahli menilai belum ada manfaat terverifikasi, ditambah 17% yang menilai manfaatnya sangat terbatas dan 11% terbatas. Hanya 4% ahli yang melihat manfaatnya cukup besar atau sangat besar (Gambar 20). Dengan kata lain, anggaran yang digunakan untuk membiayai Presiden dalam melakukan kunjungan luar negeri hanya menjadi beban fiskal tambahan.

Gambar 20

Persepsi Ahli terhadap Manfaat Diplomasi dan Kunjungan Luar Negeri Presiden



Sumber:

Survei Ahli, N = 129, diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan, "Seberapa besar manfaat terverifikasi dari diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden?"

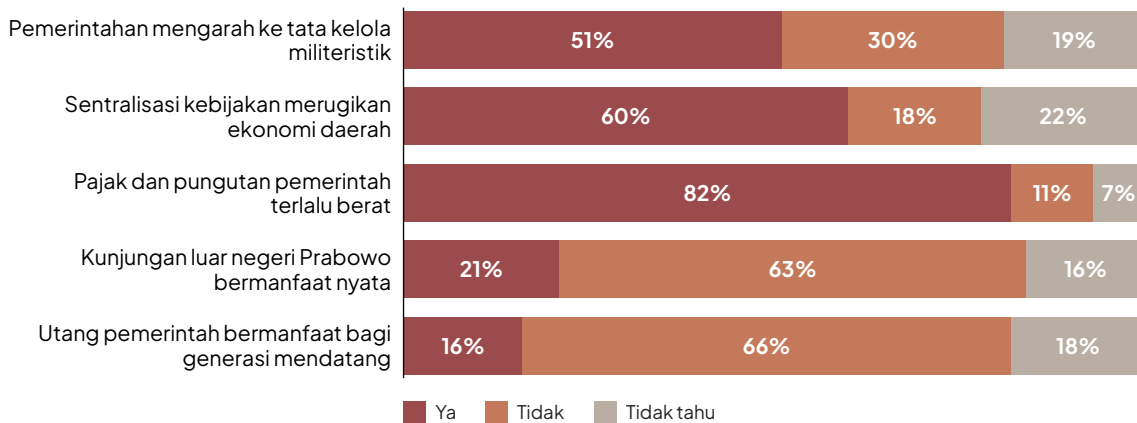
Opsijawaban meliputi "Sangat besar", "Cukup besar", "Sangat terbatas", "Terbatas", "Belum ada manfaat terverifikasi", dan "Tidak tahu".

Sebanyak 51% responden menilai pemerintahan mengarah pada tata kelola militeristik, sementara 60% menilai sentralisasi kebijakan merugikan ekonomi daerah. Penilaian terhadap beban pajak bahkan lebih dominan, dengan 82% responden menyatakan pajak dan pungutan pemerintah terlalu berat. Sebaliknya, hanya 21% yang menilai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo memberikan manfaat nyata dan 16% yang menilai utang pemerintah bermanfaat bagi generasi mendatang (Gambar 21).

Secara keseluruhan, responden lebih banyak melihat beban dan risiko daripada manfaat dari berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai. Pola ini tercermin dalam kekhawatiran terhadap arah tata kelola, dampak kebijakan terhadap ekonomi daerah, beban fiskal masyarakat, serta manfaat kebijakan bagi kepentingan jangka panjang.

Gambar 21

Penilaian Lima Pernyataan Kebijakan Pemerintah



Sumber:

Survei Masyarakat Umum, N = 1.142, diolah oleh peneliti.

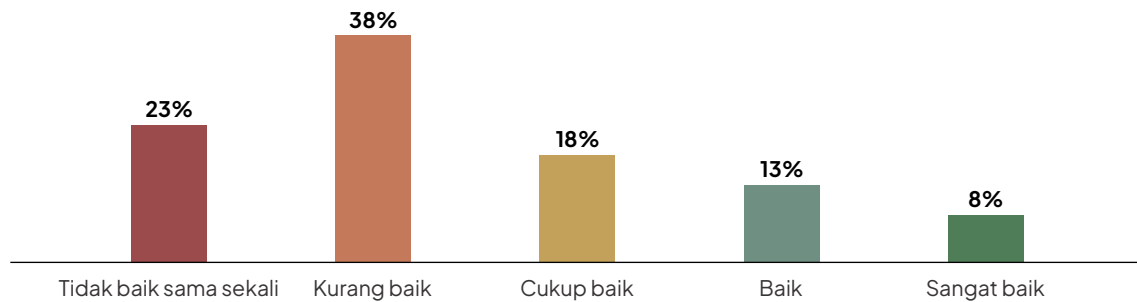
Responden ditanyakan, "Apakah menurut Anda Prabowo-Gibran mendorong tata kelola pemerintahan ke arah militeristik?", "Apakah menurut Anda sentralisasi kebijakan Prabowo merugikan ekonomi daerah?", "Apakah kunjungan luar negeri Prabowo telah membawa manfaat yang nyata bagi rakyat Indonesia?", "Apakah utang yang dibuat oleh pemerintah hari ini memberikan manfaat bagi generasi mendatang?".

▲ Sebanyak 61% responden menilai kondisi fisik dan mental Presiden kurang mendukung untuk menjalankan tugas kepemimpinan, terdiri dari 38% yang menilai kurang baik dan 23% yang menilai tidak baik sama sekali (Gambar 22).

Sebaliknya, hanya 21% responden yang memberikan penilaian positif. Angka ini memperlihatkan bahwa keraguan publik tidak berhenti pada kebijakan pemerintah, tetapi juga menyentuh kemampuan fisik dan mental Presiden. Memimpin negara menuntut konsentrasi, stamina, ketajaman mengambil keputusan, dan kemampuan menghadapi tekanan politik serta ekonomi yang datang bersamaan.

Gambar 22

Penilaian Kondisi Fisik dan Mental Presiden untuk Memimpin



Sumber:

Survei Masyarakat Umum, N = 1.142, diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan, "Apakah menurut Anda kondisi fisik dan mental Presiden Prabowo Subianto saat ini masih cukup baik untuk memimpin negara dan mengambil keputusan strategis?"

Opsijawaban meliputi "Tidak baik sama sekali", "Kurang baik", "Cukup baik", "Baik", dan "Sangat baik".

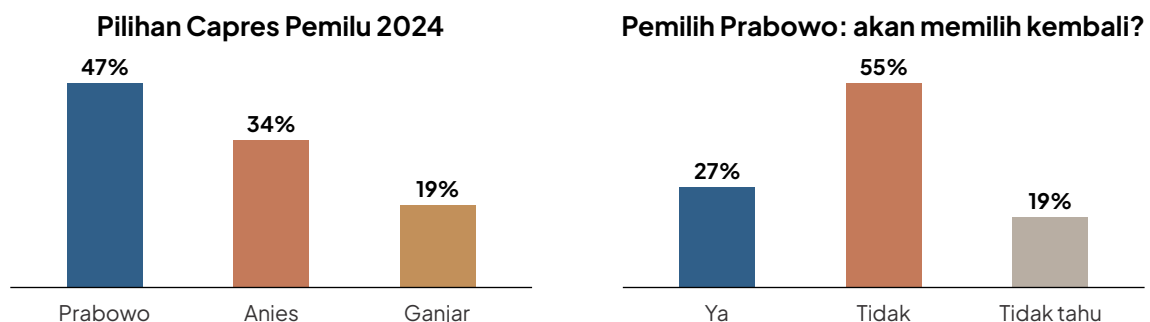
▲ Hasil survei menunjukkan bahwa responden yang memilih Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 cenderung tidak akan memilih kembali pada Pilpres mendatang.

Ketika ditanya mengenai pilihan pada pilpres mendatang, hanya 27% yang menyatakan akan kembali memilih Prabowo (Gambar 23). Sebaliknya, 55% responden menyatakan tidak akan memilih Prabowo Subianto lagi, sementara 19% belum menentukan pilihan.

▲ Artinya, lebih dari separuh responden yang sebelumnya memilih Prabowo menyatakan tidak akan kembali memberikan suaranya kepada Prabowo pada Pilpres mendatang.

Gambar 23

Pilihan Capres Pemilu 2024 dan Niat Memilih Kembali Pemilih Prabowo



Sumber:

Survei Masyarakat Umum, N = 1.142, diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan, "Siapa calon presiden yang Anda pilih pada Pemilu 2024?"

Jika memilih Prabowo, maka akan dilanjutkan pertanyaan: "Jika Anda memilih Prabowo pada Pemilu 2024, setelah melihat kinerja 2 tahun terakhir, apakah Anda akan memilihnya kembali jika pemilu diadakan sekarang?"

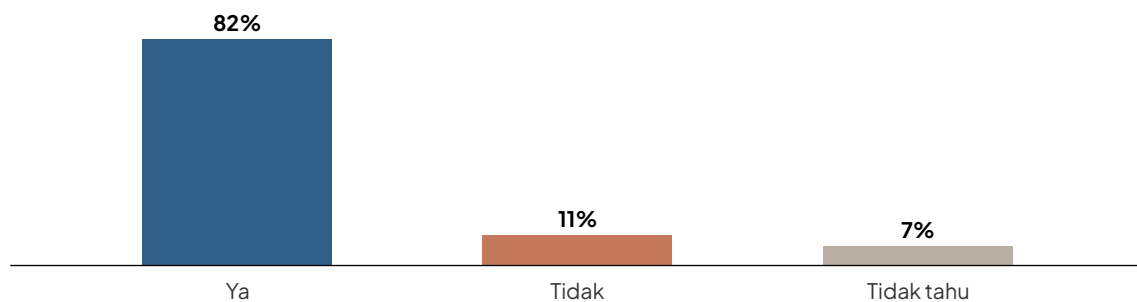
Opsijawaban meliputi "Ya", "Tidak", dan "Tidak tahu".

5.5. Kinerja Pemerintahan dan Dampaknya Bagi Masyarakat

Sebanyak 82% responden menilai pajak dan pungutan pemerintah terlalu berat. Sementara itu, hanya 11% yang tidak sependapat dan 7% lainnya tidak tahu (lihat Gambar 24). Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa terbebani oleh pajak dan pungutan pemerintah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan penerimaan negara berisiko menambah tekanan ekonomi masyarakat, terutama ketika kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih menjadi tantangan.

Gambar 24

Persepsi Masyarakat terhadap Pajak dan Pungutan Pemerintah



Sumber:

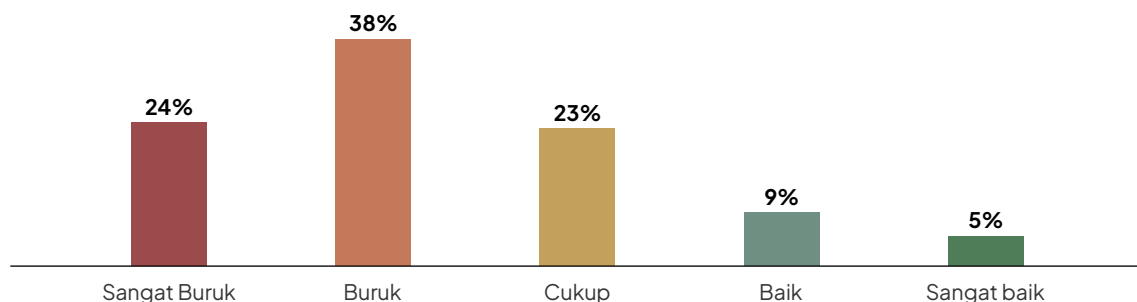
Survei Masyarakat Umum, N = 1.142, diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan, "Apakah Anda merasa pajak dan pungutan pemerintah saat ini terlalu berat?" Opsi jawaban meliputi "Ya", "Tidak", dan "Tidak tahu".

Mayoritas responden menilai upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan membuka lapangan kerja belum berjalan efektif. Sebanyak 38% menilai buruk dan 24% menilai sangat buruk. Sementara itu, 23% menilai cukup, dan hanya 14% yang memberikan penilaian positif (9% baik dan 5% sangat baik) (Gambar 25). Artinya, 62% responden menilai negatif upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan membuka lapangan kerja. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dinilai tidak efektif oleh sebagian besar responden.

Gambar 25

Penilaian Kebijakan Mengatasi Pengangguran dan Membuka Lapangan Kerja



Sumber:

Survei Masyarakat Umum, N = 1.142, diolah oleh peneliti.

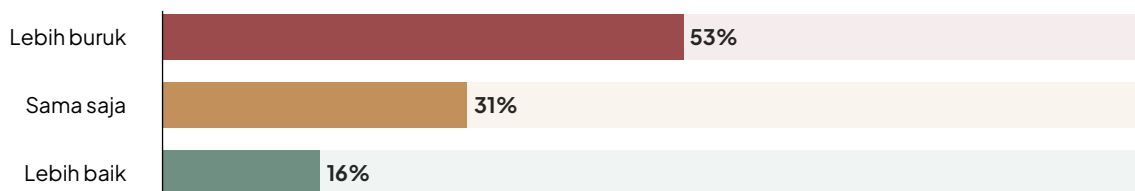
Responden ditanyakan, "Bagaimana penilaian Anda terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan membuka lapangan kerja?" Opsi jawaban meliputi "Sangat buruk", "Buruk", "Cukup", "Baik", dan "Sangat baik".

Kebijakan pemerintah yang tidak efektif dalam mengatasi kondisi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja pada akhirnya berdampak pada kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat. Lebih dari separuh responden (53%) merasa kondisi ekonomi rumah tangganya lebih buruk dibandingkan satu tahun yang lalu, 31% responden merasa tidak ada perubahan, dan hanya 16% yang merasa lebih baik (Gambar 26). Artinya jumlah rumah tangga yang ekonominya memburuk lebih dari tiga kali lipat dibandingkan yang membaik. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin menurun.

▲ Artinya jumlah rumah tangga yang ekonominya memburuk lebih dari tiga kali lipat dibandingkan yang membaik.

Gambar 26

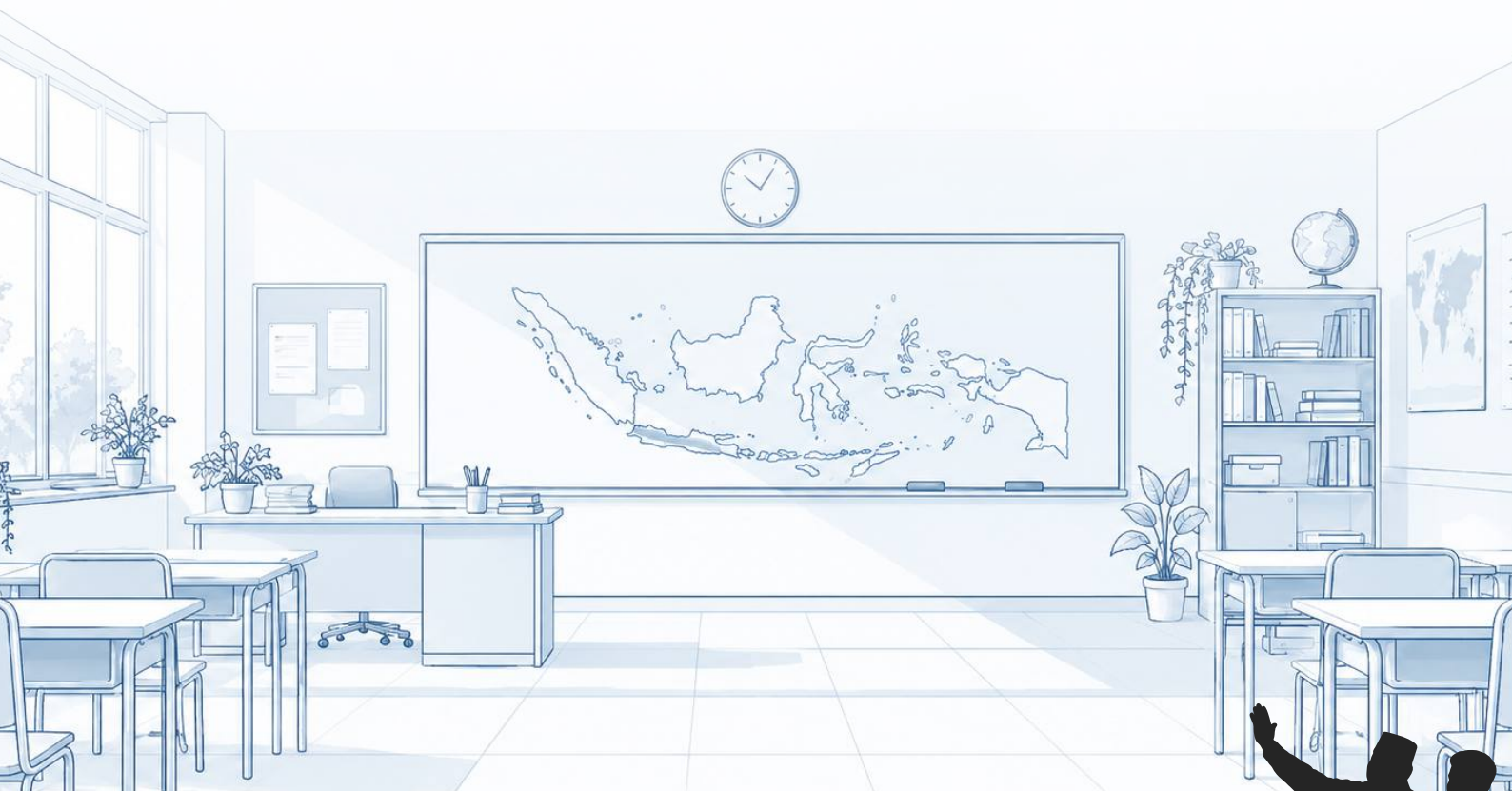
Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Dibandingkan Setahun Lalu



Sumber:

Survei Masyarakat Umum, N = 1.142, diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan, "Bagaimana penilaian Anda terhadap kondisi ekonomi rumah tangga Anda dibandingkan setahun lalu?" Opsi jawaban meliputi "Lebih Buruk", "Sama Saja", "Lebih Baik".



6

Pesan Untuk Prabowo Subianto



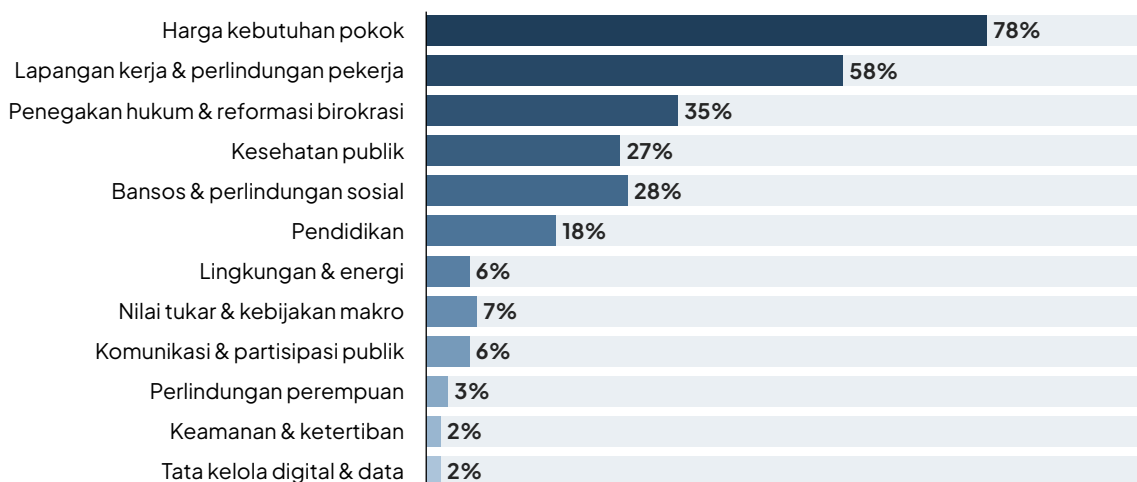
Hanya butuh lima menit membaca pesan ini.

Rapor ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari ambisi dan klaim pencapaian, tetapi dari dampak nyata kebijakan serta konsekuensinya bagi rakyat. Presiden perlu meninjau kembali arah pemerintahan, berani mengoreksi kekeliruan, dan memastikan bahwa kekuasaan tidak kehilangan orientasi utamanya: kepentingan publik, bukan konsolidasi politik.

Studi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden (78%) menempatkan tingginya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan paling mendesak untuk segera ditangani pemerintah. Sementara 58% responden menilai prioritas berikutnya adalah masalah lapangan kerja dan perlindungan pekerja. Kemudian, sebanyak 35% menilai pemerintah harus segera memperbaiki masalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi (Gambar 27).

Gambar 27

Tiga Masalah Utama yang Harus Segera Diperbaiki Pemerintah



Sumber:

Survei Masyarakat Umum, N = 1.142, diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan, "Apa tiga hal utama yang harus segera diperbaiki oleh pemerintahan Prabowo-Gibran agar lebih dipercaya rakyat?" Opsi jawaban, "Harga kebutuhan pokok", "Lapangan kerja & perlindungan pekerja", "Penegakan hukum & reformasi birokrasi", "Kesehatan publik", "Bansos & perlindungan sosial", "Pendidikan", "Lingkungan & energi", "Nilai tukar & kebijakan makro", "Komunikasi & partisipasi publik", "Perlindungan perempuan", "Keamanan & ketertiban", dan "Tata kelola digital & data".

6.1. Rekomendasi Koreksi Arah Kebijakan Pemerintah

Temuan rapor ini menegaskan perlunya koreksi mendasar terhadap arah kebijakan pemerintah. Berikut catatan kritis dan rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti:

1 Hentikan pemotongan Dana Desa demi kepentingan KDMP

Terbukti dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 menetapkan penyesuaian sebesar 58,03% dari pagu Dana Desa setiap desa atau secara kumulatif seluruh desa sebesar Rp34,57 triliun, untuk mendukung implementasi KDMP⁷. Aturan tersebut dipertegas oleh PMK Nomor 15 Tahun 2026 dimana kewajiban pembiayaan pembangunan gerai, pergudangan, dan perlengkapan koperasi boleh menggunakan Dana Desa⁸. Skema yang jelas sangat berisiko bagi masyarakat dan keuangan pemerintah desa.

Implikasinya, keterbatasan anggaran akibat pengalihan Dana Desa untuk pembangunan dan operasional KDMP berisiko mengorbankan program prioritas yang telah disepakati melalui musyawarah desa, mulai dari pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, hingga perbaikan infrastruktur. Pemerintah harus segera mengembalikan Dana Desa sebagai instrumen kedaulatan fiskal desa dan memastikan penggunaannya berpijak pada kebutuhan masyarakat setempat. Dengan tata kelola yang cenderung top-down, KDMP berisiko menjadi program yang tidak efektif karena mengabaikan kebutuhan dan kapasitas ekonomi lokal. KDMP justru berpotensi menjadi kanibal bagi koperasi dan UMKM yang telah tumbuh, beroperasi, dan melayani masyarakat desa.

Pembangunan ekonomi desa seharusnya memperkuat inisiatif lokal, bukan mematikan usaha yang telah lebih dahulu tumbuh dan mengalihkan anggaran dari kebutuhan mendasar masyarakat.

2 Wujudkan Zaken Kabinet, bukan bagi-bagi kekuasaan dengan mengabaikan prinsip meritokrasi

Menteri yang hanya memproduksi pernyataan dan program tanpa implementasi nyata serta tidak dapat menyelesaikan masalah publik hari ini harus segera di reshuffle. Reshuffle juga tidak boleh sekedar menjadi arena pertukaran kursi dan kompromi elite politik. Mekanisme reshuffle harus berdasar pada evaluasi terhadap kegagalan kebijakan dan program yang dijalankan. Kompetensi menteri tidak boleh diukur dari popularitas, melainkan dari kapasitas analitis untuk merumuskan masalah, kapasitas operasional dalam penggunaan anggaran dan birokrasi, dan kapasitas politik dalam membangun koordinasi dan legitimasi.

⁷ Kementerian Keuangan RI, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026.

⁸ Kementerian Keuangan RI, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026.



“Kabinet Gemuk” menciptakan pemborosan anggaran dan hanya merugikan kas negara, namun tidak berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Janji kampanye pada saat pemilu tentang Zaken Kabinet harus segera diwujudkan. Anggaran banyak digunakan hanya untuk transisi administrasi struktur kabinet yang semakin gemuk. Padahal anggaran yang digunakan adalah hasil pajak yang diambil dari saku rakyat, yang mana sedang anjlok daya belinya akibat kebijakan pemerintah.

Perampingan kabinet bukan sekadar mengurangi jabatan, tetapi mereformasi cara negara bekerja. Kementerian dan lembaga dengan fungsi tumpang tindih perlu digabung untuk memangkas struktur dan jabatan politik yang tidak esensial. Zaken Kabinet harus dibangun atas dasar kompetensi, integritas, dan meritokrasi, bukan kompromi antarpolisi atau popularitas.

3

Segera terapkan Pajak Kekayaan, pajak semakin mencekik rakyat, Pemerintah harus segera mengganti arah kebijakan pajak agar lebih tajam ke lapisan orang super kaya

Rasio pajak Indonesia berdasarkan nota keuangan APBN 2026 tidak pernah menyentuh 10% selama satu dekade terakhir. Bahkan dalam APBN 2027, target rasio pajak hanya mencapai 9,26%⁹. Persoalan rendahnya penerimaan pajak tidak dapat selalu dijawab dengan menaikkan beban pajak existing yang bersifat regresif. Perlu ada alternatif skema pajak tanpa menargetkan masyarakat kelas menengah ke bawah. Skema pajak yang bersifat progresif dan berbasis pada perhitungan aset kekayaan individu setelah dikurangi kewajiban. Perlu digaris bawahi bahwa pajak kekayaan tidak sama dengan pajak penghasilan.

Pajak kekayaan juga bersifat progresif, karena target pajak merupakan individu yang masuk dalam kategori ultra-kaya. CELIOS menawarkan cukup 1-2% saja besaran pajak yang harus dibayarkan oleh individu dengan kekayaan lebih dari Rp84 miliar dapat menambah penerimaan pajak hingga Rp142,2 triliun per tahun¹⁰. Mengapa individu ultra-kaya? Karena mereka yang mendapatkan porsi keuntungan paling besar dari bumi Indonesia¹¹. Faktanya 58% kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia didapatkan dari hasil mengekstraksi sumber daya alam Indonesia. Tetapi perlu ditekankan, orientasi pajak kekayaan bukanlah menghukum keberhasilan ekonomi segelintir orang, tetapi memastikan kelompok yang menikmati manfaat paling besar dari pertumbuhan ekonomi harus ikut memikul tanggung jawab fiskal yang lebih besar.

⁹ Ekonomi Bisnis, Artikel Alternatif DIP: Kejar Target Rasio Pajak, Telinga Dalam Satu Dekade Lebih. [Baca artikel.](#)

¹⁰ CELIOS, Laporan Ketimpangan 2026. [Akses laporan.](#)

¹¹ Ibid.



4

Hentikan cara berutang secara agresif di tengah rasio pajak yang rendah dan pemborosan belanja program prioritas

Pengendalian utang diperlukan bukan hanya memastikan rasio utang tetap dibawah 60% dari PDB, namun memastikan pemerintah memiliki kemampuan bayar utang. Saat ini rasio beban bunga utang pemerintah terhadap penerimaan pajak mencapai 24%. Beban bunga utang Rp 599,4 triliun sudah melampaui anggaran untuk belanja kesehatan Rp247,3 triliun, ini merupakan indikasi kegagalan negara secara sistemik menurut Sekjen PBB, Antonio Guterres. Candu utang melalui penerbitan global bond dan SBN berbunga tinggi ikut memicu pelemahan kurs rupiah.

Banyak cara kreatif untuk mengurangi beban utang, tentu dimulai dari pengurangan beban belanja program yang tidak urgen, dan boros seperti MBG dan KDMP. Selain itu pemerintah bisa memulai negosiasi dengan kreditur melalui debt cancellation (penghapusan bunga atau pokok utang), dan debt swap (menukar utang dengan program restorasi hutan). Ketidakmampuan pemerintah menekan beban bunga dan pokok utang hanya menciptakan debt overhang, dan menghancurkan keadilan antar-generasi.

5

Ganti indikator ekonomi dengan mempertimbangkan kebahagiaan penduduk (*happiness index*), dan daya dukung lingkungan (*planetary boundary*)

Selama indikator pembangunan ekonomi masih gunakan pertumbuhan tanpa batas, maka krisis ekologis seperti bencana Karhutla dan banjir ditanggung masyarakat dan kas negara. Studi CELIOS (2026) mengungkapkan biaya Rp123,1 triliun kerugian ekonomi akibat Karhutla, dan Rp68,6 triliun kerugian banjir Sumatera. Model ekstraktivisme dengan jalan ekspansi pertambangan, hilirisasi yang mengorbankan hutan, ketergantungan subsidi energi fosil sudah tidak relevan bagi Indonesia.

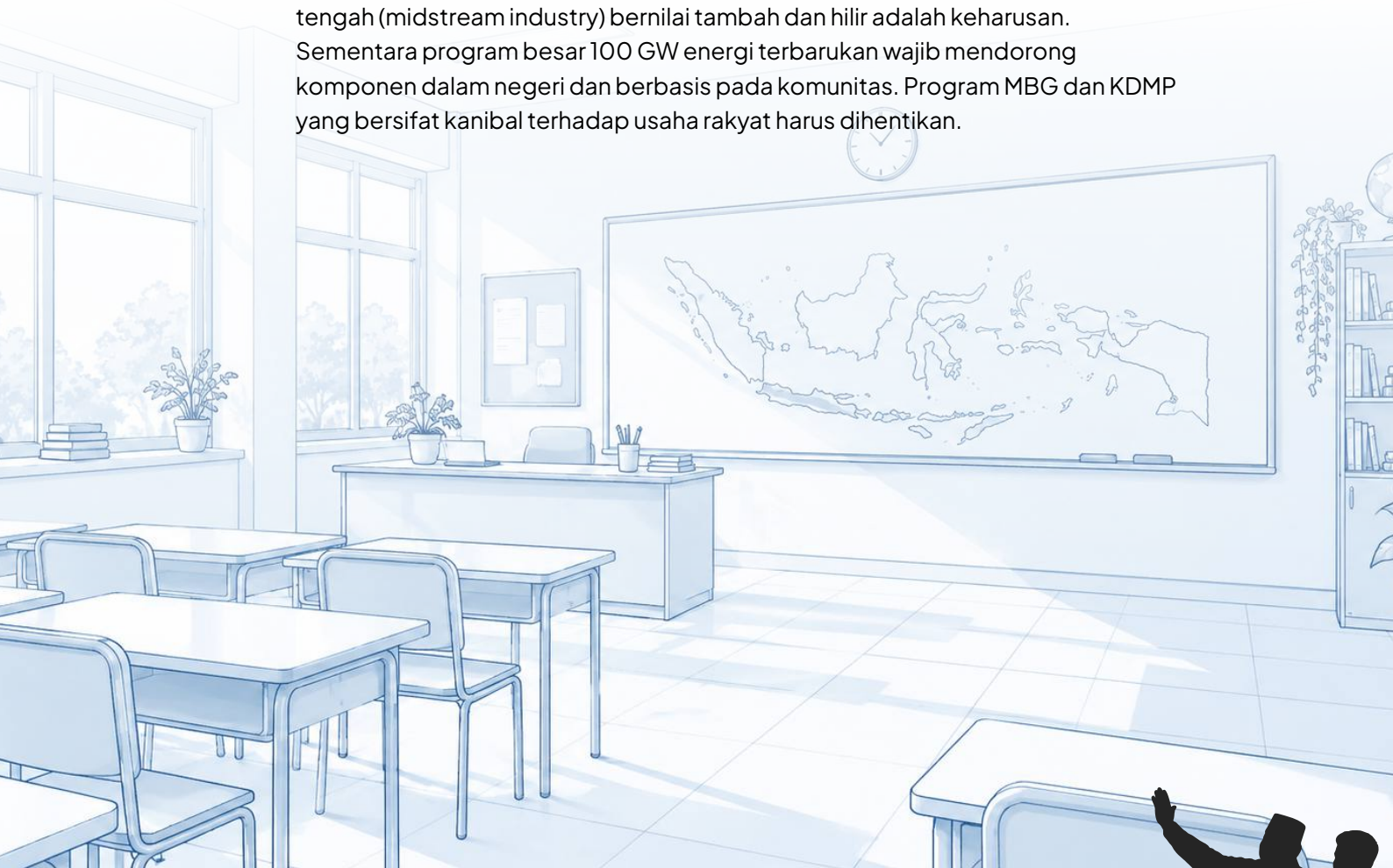
Perubahan paradigma pembangunan dimulai dari asumsi rencana ekonomi pemerintah, hingga perombakan total asumsi dalam setiap penyusunan APBN. Pemerintah bisa menjadikan Doughnut Economy atau model ekonomi dengan 9 batas ekologis sebagai referensi penyusunan arah kebijakan. Pengarusutamaan model ekonomi restoratif dan regeneratif sebagai aplikasi program berkelanjutan perlu mendapat dukungan insentif dari pemerintah. Paling penting pelibatan masyarakat khususnya kaum masyarakat adat, perempuan dan generasi muda wajib untuk menentukan arah ekonomi.



Ciptakan lapangan kerja yang adil dan berkualitas. Lapangan kerja untuk semua bukan untuk segelintir orang yang punya koneksi politik dan *privileges*

Terlalu banyak jumlah pengangguran usia muda di Indonesia. Data BPS 2025 menunjukkan sebanyak 51,5% pengangguran di Indonesia adalah usia muda (15-24 tahun). Data ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengangguran usia muda tertinggi di Asia Tenggara. Studi CELIOS 2026 mengungkap sebanyak 109 juta orang di Indonesia walaupun bekerja, upahnya di bawah upah minimum. Rata-rata Gen Z menunggu panggilan kerja selama 12 bulan. Ini bukan hanya persoalan skill mismatch di bangku pendidikan, tapi masalah struktural. Wakil Presiden Gibran mendapat *privileges* pekerjaan karena orang tua dan pamannya. Matinya meritokrasi membuat tangga mobilitas sosial terutama karier terhambat. Nepotisme, jalur orang dalam hingga diskriminasi kerja berdasar usia adalah masalah utama yang harus diselesaikan. Kembalikan merit based system dalam rekrutmen tenaga kerja, dimulai dari instansi pemerintah pusat, daerah hingga BUMN (termasuk Danantara).

Saat bersamaan, redupnya industrialisasi harus dipulihkan. Sumber lapangan kerja yang bersifat padat karya tidak boleh dianaktirikan, karena investasi padat modal makin berkorelasi dengan menurunnya jumlah serapan kerja. Hilirisasi yang masih mengolah bahan mentah, kendati sekarang punya kementerian sendiri tak banyak membantu serapan kerja berkualitas. Solusi final berupa mendorong industri tengah (*midstream industry*) bernilai tambah dan hilir adalah keharusan. Sementara program besar 100 GW energi terbarukan wajib mendorong komponen dalam negeri dan berbasis pada komunitas. Program MBG dan KDMP yang bersifat kanibal terhadap usaha rakyat harus dihentikan.



7

Mencari Pemimpin Masa Depan

“ Pemimpin ideal ke depan bukan sekadar mereka yang bisa berpidato di mimbar, tetapi memiliki kemampuan analitik yang kuat, mampu menjaga kejernihan berpikir, memiliki etika dan empati, dan keberanian mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan partai dan golongan. Negara sebesar Indonesia membutuhkan pemimpin yang sehat dalam pertimbangan, matang dalam tindakan, dan selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas ambisi pribadi.



Studi ini menunjukkan bahwa sebanyak 54% ahli menilai komitmen terhadap demokrasi, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia menjadi kriteria utama yang diprioritaskan ahli dalam memilih calon pemimpin nasional pada Pemilu 2029 (lihat Gambar 28). Komitmen terhadap pemberantasan korupsi juga turut menjadi kriteria yang dinilai oleh 53% ahli harus melekat pada karakter seorang pemimpin negara. Kompetensi teknokratik (49%) dan rekam jejak kebijakan yang terukur (46%) juga menjadi pertimbangan penting. Sedangkan, latar belakang militer hanya dipilih oleh 1% ahli. Temuan ini menunjukkan bahwa ahli lebih memprioritaskan integritas, komitmen demokratis, dan kapasitas teknokratik daripada latar belakang militer dalam menentukan kriteria kepemimpinan nasional selanjutnya.

Gambar 28

Kriteria Calon Pemimpin Nasional pada Pemilu 2029 Menurut Ahli



Sumber:

Survei Ahli, N = 129, diolah oleh peneliti.

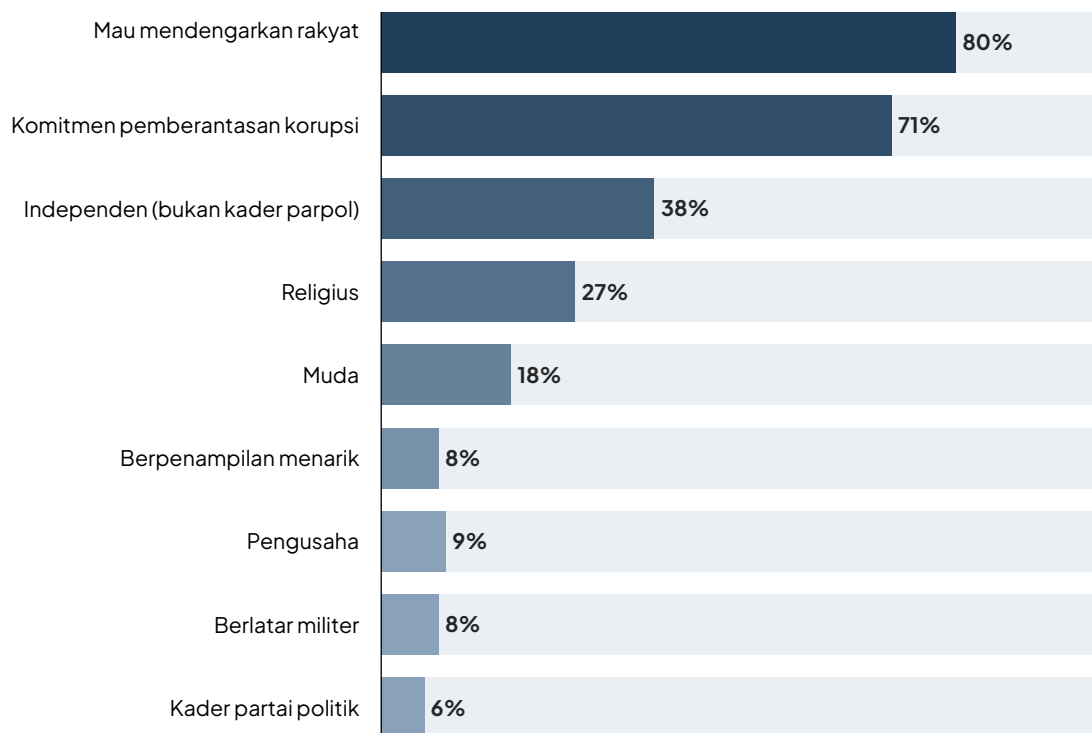
Responden ditanyakan, "Menurut Anda, kriteria apa yang paling penting dimiliki oleh calon pemimpin nasional Indonesia pada Pemilihan Umum 2029? Pilih paling banyak tiga kriteria".

Opsi jawaban meliputi "Rekam jejak kebijakan yang terukur", "Kompetensi teknokratik dan penguasaan substansi kebijakan", "Komitmen pada pemberantasan korupsi", "Komitmen pada demokrasi, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia", "Kesediaan mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat", "Berlatar belakang militer", "Berlatar belakang dunia usaha", "Kader partai politik", "Independen, bukan kader partai politik", "Berusia muda", "Ketaatan menjalankan ajaran agama", "Kemampuan tampil dan berkomunikasi di hadapan publik", dan "Kriteria lainnya".

Sejalan dengan penilaian ahli, hasil survei masyarakat umum juga menunjukkan bahwa sebanyak 80% responden menginginkan pemimpin masa depan yang mau mendengarkan rakyat (lihat Gambar 29). Sebanyak 71% responden juga menginginkan pemimpin yang memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Temuan menariknya sebanyak 38% responden justru akan memilih pemimpin yang independen dan bukan merupakan perwakilan (kader) partai politik. Berarti ada indikasi kuat bahwa pada pemilu mendatang masyarakat akan memilih pemimpin yang memiliki kapasitas dalam merespons kepentingan publik, memberantas korupsi, dan memiliki independensi politik dibandingkan atribut personal maupun latar belakang tertentu. Bahkan atribut yang sangat melekat dengan Presiden pada pemerintahan hari ini, seperti berlatar belakang militer (8%) dan kader partai politik (6%) berada pada tingkat pilihan yang jauh lebih rendah.

Gambar 29

Kriteria Pemimpin Masa Depan Indonesia Tahun 2029 Menurut Masyarakat



Sumber:

Survei Masyarakat Umum, N = 1.142, diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan, "Menurut Anda, apa kriteria pemimpin masa depan Indonesia tahun 2029?" Opsi jawaban meliputi Mau mendengarkan rakyat, "Komitmen pemberantasan korupsi", "Independen (bukan kader parpol)", "Religius", "Muda", "Berpenampilan menarik", "Pengusaha", "Berlatar militer", dan "Kader partai politik".



**Center of Economic and Law Studies
(CELIOS)**

Jl. Banyumas, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia

E : admin@celios.co.id
W : celios.co.id